



**LEMBAGA PKPU SEBAGAI SARANA
RESTRUKTURISASI UTANG BAGI DEBITOR
TERHADAP PARA KREDITOR**

(Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh

**SRIWIJASTUTI
B4B 008 264**

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Etty Susilowati, SH.MS.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama :

SRIWIJIASTUTI

dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. ***Tidak keberatan untuk dipublikasikan*** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 19 Juni 2010

Yang menerangkan,

Sriwijastuti

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul **“LEMBAGA PKPU SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG BAGI DEBITOR TERHADAP PARA KREDITOR (Study Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Prof. Dr. Etty Susilowati, SH.MS., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tanpa jenuh beliau senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan, tenaga dan pikiran maupun dorongan moril yang begitu besar artinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.,Spd. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., MS. selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;

5. Bapak Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Bidang Administrasi Dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
6. Ibuku Rosda Sayogo tercinta atas kasih sayang yang tulus, bimbingan, doa restu dan keridhaan serta pengorbanannya, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
7. Suamiku tercinta Hendra Moeslim atas dukungan dan doanya serta selalu setia mendampingi penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan;
8. Kakak-kakakku dan adiku tercinta atas dukungan dan doa restu serta kasih sayang kepada penulis;
9. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
10. Semua pihak dan rekan–rekan mahasiswa M.Kn Undip angkatan 2008 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan Penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Semarang, 19 Juni 2010

Penulis

Abstrak
LEMBAGA PKPU SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG BAGI
DEBITOR TERHADAP PARA KREDITOR
(Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka berkemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor, dan juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditornya pada keputusan Pengadilan Niaga telah sesuai dengan UUK dan PKPU (Pada Kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera) dan kepentingan para pihak (kreditor dan debitor) dalam PKPU pada Kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera telah mendapat perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditornya digunakan antara sebagai tanggapan atau tangkisan atau counter terhadap permohonan pailit, sehingga dengan mengajukan permohonan PKPU, maka Pemohon PKPU, PT. Anugerah Tiara Sejahtera, telah mengakui segala sesuatu yang didalilkan oleh Pemohon Pailit, PT. Bank BUKOPIN Tbk. terutama tentang seluruh syarat substansial Pemohon PKPU. Syarat substansial dalam mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 225 UUK dan PKPU, bagi debitor yang beritikad baik, persyaratan tersebut sudah cukup memadai. 2) Perlindungan kepentingan para pihak (kreditor dan debitor) dalam PKPU merupakan salah satu cara untuk menghindarkan suatu perusahaan terbebas dan kepaititan, khususnya pada Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 dimana pihak kreditor juga telah dapat mengajukan PKPU bagi debitornya, yang selama ini tidak dimungkinkan oleh Undang-undang No.4 Tahun 1998 sehingga bagi kreditor yang mengalami permasalahan dengan utang-utang debitor yang telah jatuh tempo demi keamanannya, hanya mempunyai jalan mempailitkan debitor, jika cara-cara yang bersifat musyawarah tidak bermanfaat.

Pada kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera, kepentingan para pihak telah mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci : PKPU, Restrukturisasi Utang

Abstract
PKPU INSTITUTION AS DEBT RESTRUCTURING TOOL
FOR DEBTOR TOWARDS CREDITOR
(Study case at PT. Anugerah Tiara Sejahtera)

Debt payment duty delay (PKPU) a time that given by court judge trades to debtor and creditor to negotiation debtor debt payment manners, either partly also entire belong when necessary to debt restructuring. Given chance for debtor to postpone payment duty debts, so stand a chance for debtor to continue the effort, assets and wealth permanent defensible debtor so that can give a guarantee for debts amortization to entire creditors, and also give a chance to debtor to debts restructuring, while for creditor, pkpu that given to also meant so that creditor has got certainty has hitted claim, the credit debt can be liquidated by debtor.

As to aim that want achieved in research study and analyze institution pkpu as debt restructuring tool for debtor towards the creditors in verdict has traded as according to UUK and PKPU (in case PT. Anugrerah Tiara Sejahtera) and the parties importance (creditors and debtor) in PKPU in case PT. Anugrerah Tiara Sejahtera get law protection. The method approaches that used juridical normative, that is literature research (library research).

Based on research result, so inferential that: 1) institution pkpu as debt restructuring tool for debtor towards the creditors is used between as conception or defense or counter towards bankrupt request, so that with apply PKPU, so applicant PKPU, PT. Anugrerah Tiara Sejahtera, admit everything that postulatted by bankrupt applicant, PT. Bank Bukopin tbk. Specially about entire conditions substansial applicant PKPU. Condition substansial in apply PKPU as arranged in paragraph 225 UUK and PKPU, for debtor that intend to good, rules enough; 2) the parties importance protection (creditors and debtor) in PKPU be one of the manner to prevent a company candid and bankrupt, especially in bankruptcy law no. 37 year 2004 where does also can submit PKPU for the debtor, which during the time is not maked by law no. 4 year 1998 so that for creditor that experience troubleshoot with debtor debts that fall due by the security, has only road to bankrupt debtor, if manners has meeting bo advantage. in case PT. Anugrerah Tiara Sejahtera, the parties importance have got law protections.

Keyword: PKPU, debt restructuring

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | |
| HALAMAN PERNYATAAN | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| DAFTAR ISI | vii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Pemikiran..... | 8 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| 1. Metode Pendekatan | 15 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 16 |
| 3. Obyek dan Subyek Penelitian | 16 |
| a. Obyek Penelitian | 16 |

| | |
|----------------------------------|----|
| b. Subyek Penelitian | 16 |
| 4. Sumber dan Jenis Data | 17 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 18 |
| 6. Teknik Analisis Data | 19 |
| G. Sistematika Penulisan | 20 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan | 22 |
| 1. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan | 22 |
| 2. Syarat-Syarat Untuk Dipailitkan | 25 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | 28 |
| 1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Melepaskan Debitor Dari Kepailitan | 28 |
| 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Hakekatnya Untuk Mengadakan Perdamaian | 32 |
| 3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Ditujukan Untuk Para Kreditor Konkuren | 37 |
| 4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang Dikabulkan Harus Memenuhi Asas Publisitas | 43 |

| | |
|--------------------------------------------------------|----|
| 5. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | |
| Sementara dan Tetap | 46 |
| 6. Penyebab Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran | |
| Utang (PKPU) | 49 |
| 7. Pengesahan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga | 52 |
| C. Restrukturisasi Utang Dalam Hukum Kepailitan | 54 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---------------------------------------------------------------|----|
| A. Kasus Posisi..... | 58 |
| 1. Duduk Perkara..... | 58 |
| 2. Putusan Pengadilan Niaga. | 58 |
| B. Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi | |
| Debitor Terhadap Para Kreditornya Pada Kasus PT. Anugerah | |
| Tiara Sejahtera..... | 59 |
| C. Perlindungan Kepentingan Para Pihak (Kreditor dan Debitor) | |
| Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | 80 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 103 |
| B. Saran | 104 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan ekonomi, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan sebagian telah berada diambang kebangkrutan dan sebagian besar perusahaan atau pengusaha tidak dapat membayar utang piutangnya, ketidakmampuan untuk membayar utang tersebut, telah berdampak dengan dinyatakan pailit oleh kreditor melalui Pengadilan Niaga, namun kepada yang bersangkutan masih diberikan waktu melakukan prioritas penundaan pembayaran utang.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka berkemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor, dan juga memberi kesempatan kepada debitor untuk

merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagibannya, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor.¹

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, baik semasa *Faillissement Verordening* Stb .1905 No.217 juncto Stb. 1906 No.348, setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia Juli 1997, maka dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 135) dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU), dimana instrumen hukum tersebut diperlukan untuk memfasilitasi permasalahan hukum pembayaran utang dan pernyataan pailit.

Penyelesaian dengan permohonan pailit, suatu masalah utang piutang dapat pula diselesaikan melalui mekanisme yang disebut penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Diajukannya PKPU ini biasanya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi seluruh tawaran pembayaran dari seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Mekanisme seperti ini dilakukan oleh debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang

¹ Kartini Muljadi, dalam Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001). Hal. 173

sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.²

Mekanisme PKPU selain dilakukan oleh debitor, juga dapat dilakukan oleh kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang dinerikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.³

Selanjutnya menurut Fred BG Tumbuan pengajuan PKPU ini juga dalam rangka untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, penundaan

² Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2008), Hal. 328

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 15

kewajiban pembayaran utang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar debitor dapat melunasi kewajibannya.⁴

Hal ini karena melihat sifat kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak ada artinya memailitkan suatu subyek yang tidak mempunyai titel hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum. Tentunya tidak mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kompetensi atas harta bendanya, atau dengan kata lain barang tersebut milik orang lain.

Selain itu, khusus untuk subyek badan hukum dapat setiap saat hilang atau hapus apabila status badan hukum tersebut bubar. Misalnya Perseroan Terbatas X dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 UU PT No. 40/2007.⁵ Jadi dapat diketahui bahwa yang dibutuhkan untuk dapat dinyatakan pailit adalah kapasitas dan kecakapan suatu subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dan bukan hal lainnya.

Menurut pendapat Kartini Muljadi, PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor, maka sesungguhnya PKPU ini

⁴ Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung : Alumni, 2001) hal. 50

⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Bandung : Sinar Grafika, 2009). Hal. 5

pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren⁶. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.

Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan Debitor hanya apabila perdamaian itu dibicarakan dan melibatkan semua Kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa Kreditor saja, maka perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan Debitor.

Salah satu contoh kasus PKPU yang terjadi, pada PT. ANUGERAH TIARA SEJAHTERA, berkedudukan di Jakarta, digugat pailit oleh PT. BANK BUKOPIN, Tbk. untuk keperluan pengembangan usahanya yang bergerak di bidang perdagangan umum dan industri air minum dalam kemasan. Pengadilan Niaga melalui putusan nomor: 04/PKPU/2009/PN.NIAGA.Jkt.Pst mengabulkan permohonan PKPU dari para Kreditor, sehingga putusan Pengadilan Niaga adalah Keputusan final ("*inkracht*") yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada 11 September 2009.

Perdamaian menjadikan Debitor dan Kreditor saling menguntungkan karena :

⁶ Kartini Muljadi (2005), "*Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*", Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta (selanjutnya disebut sebagai Kartini Muljadi 2), h.164, seperti yang dikutip oleh M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001, hal.9.

1. tidak saling merugi;
2. Tindakan yang dilakukan tersebut menghapuskan adanya perselisihan hukum;
3. Tidak ada yang kalah maupun menang;
4. PT. ANUGERAH TIARA SEJAHTERA dapat melanjutkan usahanya kembali.

Kasus PT. ANUGERAH TIARA SEJAHTERA (selanjutnya PT. ATS) termasuk kasus yang Debitornya bukannya tidak mampu membayar. PT. ATS mengalami keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah disepakati, karena kondisi perekonomian yang sangat mempengaruhi seluruh kewajibannya sesuai dengan kesepakatan ada secara wajar, sehingga Debitor wanprestasi kepada para Kreditornya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian Tesis dengan judul **“LEMBAGA PKPU SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG BAGI DEBITOR TERHADAP PARA KREDITOR (Study Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah lembaga PKPU dapat digunakan sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditornya pada keputusan Pengadilan

Niaga telah sesuai dengan UUK dan PKPU (Pada Kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera) ?

2. Apakah kepentingan para pihak (kreditor dan debitor) dalam PKPU telah mendapat perlindungan hukum (Pada Kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditornya pada keputusan Pengadilan Niaga telah sesuai dengan UUK dan PKPU (Pada Kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera);
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kepentingan para pihak (kreditor dan debitor) dalam PKPU pada Kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera telah mendapat perlindungan hukum;

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian dan penulisan hukum yang dilakukan saat ini merupakan salah satu syarat kelulusan dari Program Magister Kenotariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta sebagai aplikasi dari ilmu yang

selama ini didapat di perkuliahan dan diwujudkan dalam bentuk penelitian hukum yang ilmiah. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, khususnya dibidang hukum Kepailitan yang terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai sarana restrukturisasi yang efektif disbanding sarana penyelesaian utang lainnya.

2. Manfaat praktis.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik, akademisi, praktisi hokum dan pihak-pihak terkait dengan penyelesaian utang.

E. Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoretik

Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya, karena putusan pernyataan pailit bertujuan agar harta debitor pailit diharapkan dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta seimbang.

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas terantara lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata "antara yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja) adalah:⁷

1. Asas Keseimbangan.

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;

2. Asas Kelangsungan Usaha.

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;

3. Asas Keadilan.

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulkan kreditor lainnya;

⁷ Sutan Remmy Syahdeini, *Op. Cit.* Hal. 51

4. Asas Integrasi.

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan diperlukannya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu :

1. untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, melalui suatu badan peradilan khusus yakni Pengadilan Niaga. Mengenai hal ini tentunya harus dilihat dalam konteks normatif maupun praktiknya dalam Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang.⁸

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam bab ketiga UUK dan PKPU yaitu dalam Pasal 224-294 UUK. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pasal 222 UUK dan PKPU ini dapat diartikan bahwa maksud dari penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk kreditor konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seseorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga moratorium harus dibedakan dengan gagal bayar, karena gagal bayar secara esensial berarti bahwa seorang debitor tidak melakukan pembayaran utangnya. Gagal bayar terjadi apabila sipeminjam tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati baik atas bunga maupun atas utang pokok.

⁸ Jono, *Op. Cit.* Hal. 84

Tujuan PKPU juga membantu debitor yang beritikad baik. Jadi dalam hal ini, integritas dari debitor benar-benar menjadi ujian apakah ia sungguh-sungguh ingin melunasi utang yang sudah menjadi kewajibannya. Oleh karena itulah dalam dekade terakhir ini muncul pemikiran bahwa tujuan utang tidak lagi semata-mata demi kepentingan debitor akan tetapi juga untuk kepentingan kreditor. Undang-undang membedakan PKPU ini menjadi PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara ini ditetapkan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran, sedangkan PKPU tetap ialah PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditor. Dalam PKPU ini tidak tersedia upaya hukum apapun setelah putusan diucapkan.

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UUK dan PKPU.

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya,

maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditornya.

PKPU sendiri terbagi 2 bagian, tahap pertama, adalah PKPU Sementara, dan tahap kedua adalah PKPU Tetap. Berdasarkan Pasal 224 ayat (2) UUK dan PKPU Pengadilan niaga HARUS mengabulkan permohonan PKPU Sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditor yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya.

PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditor tersebut, belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU.

Prinsip ini jelas berbeda dengan kepailitan, yang prinsip dasarnya adalah untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utang debitor. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian dalam kepailitan, namun cukup jelas bahwa kepailitan dan PKPU adalah dua hal yang berbeda, dan oleh karenanya tidak pada tempatnya untuk membandingkan secara kuantitatif kedua hal tersebut.

Berkaitan dengan efektifitas PKPU dalam restrukturisasi utang, maka akan bicara masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat yang biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku

atau tidak. Masalahnya kelihatannya sangat sederhana padahal, dibalik kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang cukup merumitkan. Didalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan anantara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaedah. Hal berlakunya kaedah-kaedah hukum tersebut disebut “*gelding*” (bahasa Belanda). Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut: ⁹

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibat;
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Kalau ditelaah secara lebih mendalam, maka agar supaya berfungsi, maka suatu kaedah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas. Jika tidak terpenuhinya salah satu unsur tidak akan berfungsi seperti yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta : CV Rajawali, 1980). hal. 15.

PKPU jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditor lain diluar PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 266 UU Kepailitan dan PKPU, sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut 'dicampuri' oleh tagihan-tagihan kreditor-kreditor yang berada diluar PKPU.

Selain itu Kreditor juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga, dan debitor akan otomatis dinyatakan pailit.

F. Metode Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰

Dalam penulisan tesis penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), Hal. 1

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, ia tidak menyetujui dikotomi yang membagi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Menurutnya, hanya terdapat satu penelitian hukum, yaitu penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, di mana sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹² Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian *deskriptif analitis*.¹³ Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan Lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang cukup efektifitas debitor terhadap para kreditor, sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), Hal. 35

¹² Ibid. Hal. 22

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit*, Hal. 10

memberi tanda pada efektifitas Lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang debitor terhadap para kreditor PT. ATS.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang cukup efektifitas debitor terhadap para kreditor dalam perkara kepailitan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 04/PKPU/2009/PN.Niaga/Jkt.Pst.

b. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian adalah PT. ATS yang mengajukan permohonan PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang debitor terhadap para kreditor dan faktor-faktor yang menentukan tercapainya perdamaian dalam masa PKPU sehingga perusahaan Debitor terhindar dari pailit.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis terdiri dari:

a) Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :¹⁴

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 04/PKPU/2009/PN.Niaga/Jkt.Pst;
- 5) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

b) Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian.¹⁵ Selain itu juga digunakan :

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan Kepailitan; dan
- 2) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang Perseroan Terbatas dan Kepailitan.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Hal. 47

¹⁵ Loc, It.

hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena dari data yang diperoleh kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek yang diteliti sehingga akan membantu kita untuk menarik suatu kesimpulan dari obyek atau fenomena yang akan diteliti.

Menurut Soerjono Soekanto, Pada penelitian hukum, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁷

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Hal ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data yaitu berupa :

- a) Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :
 - 1) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 04/PKPU/2009/PN.Niaga/Jkt.Pst
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Hal 52

¹⁷ *Loc. It*

- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 5) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.
- b) Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian;

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

¹⁸ *Ibid*, Hal. 10

Dalam bab ini, Penulis akan menyampaikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran / kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi teori yang digunakan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Konsep-konsep tersebut berupa teori-teori PKPU sebagai salah satu sarana restrukturisasi utang bagi Debitor terhadap para Kreditor dan peraturan dasar mengenai Kepailitan, Konsep-konsep tentang utang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai penyelesaian hutang melalui PKPU dan perlindungan kepentingan para pihak (kreditor dan debitor) dalam PKPU serta aktor-faktor yang menentukan tercapainya perdamaian dalam masa PKPU sehingga perusahaan Debitor terhindar dari pailit.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan dan saran untuk melengkapinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian dan Pengaturan Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan Pemerintah.¹⁹

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadarai oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan. atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

¹⁹ J. Djohansah. " Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001). Hal. 23

(*involuntary petition for self bankruptcy*).²⁰ Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proporsional.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passau prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.²¹ Sedangkan prinsip *pari passau prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.²²

Seorang Debitor hanya mempunyai satu Kreditor dan Debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka Kreditor akan menggugat Debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh

²⁰ M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008), hal. 2

²¹ Kartini Mulyadi. "*Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*", Dalam: Rudhy A. Lontoh (ed). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung. 2001. hal. 168.

²² *Ibid.* hal. 168

harta Debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta Debitor dipakai untuk membayar Kreditor tersebut. Sebaliknya dalam hal Debitor mempunyai banyak Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor, maka para Kreditor akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran atas utangnya, karena harta Debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan Kreditor-kreditor lainnya.

Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas.²³

Apabila dilihat menurut sudut sejarah hukum, Undang-undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para Kreditor dengan

²³ Lihat Kartini Muljadi. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) Hal. 75-76.

memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Syarat-Syarat Untuk Dapat Dipailitkan

Dalam Undang-Undang Kepailitan persyaratan untuk dapat dipailitkan sangat sederhana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, menentukan bahwa yang dapat dipailitkan adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya. Hal ini tidak berbeda jauh dengan syarat pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan

²⁴ Erman Radjagukguk. “Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan”, di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) Hal. 181.

dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya”.

Berdasarkan paparan di atas, maka telah jelas, bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, Debitor harus telah memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Memiliki minimal dua Kreditor atau lebih
- b. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kreditor yang tidak dibayar tersebut, kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan Debitor, tanpa melihat jumlah piutangnya.

Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dari syarat pailit yang diatur dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah :²⁵

- a. Adanya utang;
- b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d. Adanya Debitor;
- e. Adanya Kreditor;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga";
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 - 1) Pihak Debitor;
 - 2) Satu atau lebih Kreditor;
 - 3) Jaksa untuk kepentingan umum;
 - 4) Bank Indonesia jika Debitornya bank;

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 8

- 5) Bapepam jika Debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- 6) Menteri Keuangan jika Debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik;
- i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
- j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim “menyatakan pailit” bukan “dapat dinyatakan pailit.” Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak dapat diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas.

sehingga dalam pengajuan pailit terhadap Debitor oleh Kreditor, maka harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Untuk syarat dinyatakan pailit pada prinsipnya masih sama dengan Undang-Undang Kepailitan, hanya pengaturan pasalnya saja yang berubah bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan Debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang pada waktu Debitor dinyatakan pailit mempunyai hutang.

B. Pengertian PKPU dan Pelaksanaannya, Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan

1. PKPU Untuk Melepaskan Debitor Dari Kepailitan

Menurut pendapat Munir Fuady Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode

waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium.²⁶

Di dalam Undang-undang Kepailitan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 222 ayat (2) dikatakan : “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

Permohonan PKPU oleh si debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban membayar utang (PKPU) ini diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini harus diputus terlebih dahulu.

²⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 82.

Lebih lanjut menurut Munir Fuady dalam bukunya “Pengantar Hukum Bisnis” mengatakan :

“Akan tetapi, ada kalanya juga sebenarnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitor terpaksa dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para kreditornya. Jika diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) padahal permohonan pailit telah dilakukan maka hakim harus mengabulkan PKPU dalam hal ini PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sementara gugatan pailit gugur demi hukum”.²⁷

Namun PKPU bukanlah satu-satunya cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan dan likuidasi terhadap harta bendanya, menurut Sutan Remy Syahdeini dalam bukunya “Hukum Kepailitan” ada dua cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan ini :²⁸

- a) ialah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- b) Dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan kreditornya, setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, akan tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputus oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

Untuk lebih jelasnya perihal PKPU ini penulis akan membedakan kepailitan dengan PKPU dan likuidasi perusahaan dapat dilihat pada began berikut :

| Pailit | PKPU | Likuidasi |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Debitor sama sekali tidak mempunyai kewenangan | 1. Masih memiliki kewenangan menjalankan | 1. Menutup dan memberhentikan semua kegiatan |

²⁷ *Ibid.*, hal. 83.

²⁸ Sutan Remy Syahdeni, *Op. Cit*, hal. 321

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mengurus perusahaannya lagi, pemberesan harta pailit sepenuhnya oleh seorang kurator. | kegiatan perusahaan namun dengan bersama-sama pengurus yang ditunjuk oleh keputusan pengadilan. | perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktivis ²⁹ tersebut kepada kreditor dan pemegang saham dengan cara internal perusahaan dengan ditunjukkan likuidator. |
| 2. Perdamaian dalam peristiwa kepailitan adalah sebatas perdamaian yang berkenaan dengan pemberesan harta pailit (<i>boedel</i>). | 2. Perdamaian dalam rangka PKPU sangat luas cakupannya menyangkut aspek-aspek restrukturisasi. | 2. Perdamaian dapat juga dilakukan melalui penetapan pengadilan maupun perdamaian para pihak saja (sukarela) misal dalam hal jangka waktu berdirinya perseroan (PT) tersebut sudah berakhir. |
| 3. Pembayaran utang debitor hanya sebatas harta pailit. | 3. Pembayaran utang debitor bisa dibayarkan penuh tergantung kepada isi perjanjian perdamaian yang nantinya disahkan oleh pengadilan yang sudah disepakati oleh para pihak. | 3. Pembayaran utang debitor kepada debitor dapat dimusyawarahkan sebelum boleh tanpa campur tangan pengadilan. |
| 4. Terputusnya seluruh aktivitas perusahaan pada mitra kerja, PHK karyawan perusahaan dan lain-lain. Kurator | 4. Aktivitas perusahaan tetap berjalan, hanya setelah diputusnya PKPU oleh pihak pengadilan seluruh transaksi | 4. Bisnis perusahaan terhenti atau perusahaan masih dapat melaksanakan kegiatan tertentu, sejauh yang |

²⁹ Yang dimaksud dengan “aktivis” adalah seluruh kekayaan debitor, lihat Penjelasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 241.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sepenuhnya memegang peranan dalam membereskan <i>boedel</i> pailit menurut ketentuan yang berlaku sampai akhir pemberesan seluruh <i>boedel</i> . | ditentukan oleh isi perjanjian nantinya dan selama PKPU berjalan seluruh transaksi tagihan utang terhenti sementara termasuk penangguhan pelaksanaan hak-hak tanggungan dan jaminan kebendaan lainnya juga bilamana ada sita pengadilan harus dihentikan. | menyangkut dengan pemberesan kekayaannya saja. |
| 5. Kurator terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pasal 70 ayat (2b) Undang-Undang 27 tahun 2004 (legal) atas rekomendasi AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia). | 5. Pengurus terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pasal 234 ayat (3b) Undang-Undang 27 tahun 2004 (legal) rekomendasi AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia). | 5. Yang menjadi likuidator dapat oleh berbagai pihak seperti direksi perusahaan,lawyer atau akuntan publik. Penunjukkan likuidator atas kehendak/ kesepakatan para pihak atau atas penetapan pengadilan. |

Sumber : Diolah dari data sekunder

2. PKPU Pada Hakekatnya Untuk Mengadakan Perdamaian

Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, dimana si debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik petensi maupun kesulitan

membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya. Oleh karenanya langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi si debitor menjadi sangat penting. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo yang mana sementara belum dapat diselesaikan membuat si debitor terpaksa membuat suatu konsep perdamaian, yang mana konsep ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak kreditor, dengan demikian si debitor masih dapat nantinya, tentu saja jika perdamaian ini disetujui oleh para kreditor untuk meneruskan berjalannya perusahaan si debitor tersebut. Dengan kata lain tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencana perdamaian yang diajukan/ditawarkan si debitor tersebut. Hanya saja rencana perdamaian yang disusun dalam rangka PKPU menurut ketentuan undang-undang kepailitan kita, belum lagi bersifat menyeluruh dan komprehensif harlya lebih tertuju pada debitor dan kreditor, itupun sering sebagian pada yang bermasalah saja, tidak demikian halnya dengan : “Sistem yang dianut oleh *Bankruptcy Code* Amerika Serikat berkaitan dengan perundingan dan kesepakatan yang menyangkut *reorganization plan* berdasarkan *Chapter* 11, menurut section 1126 (a), bukan saja kreditor, tetapi juga pemegang saham (*share holders*) memberikan hak suaranya berkaitan dengan *Chapter* 11 plan.³⁰

³⁰ *Ibid.*, hal. 387

Hal ini antara lain disebabkan oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingannya. “Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili kepentingan perseroan atau PT adalah prinsip “*persona standing in judicio* atau *capacity standing incourt or in judgement* yaitu hak untuk mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan yang tiada lain dilakukan oleh organ perseroan tersebut”.³¹

Namun dengan diberikannya hak Derivatif³² berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka hak-hak pemegang saham minoritas, dalam hal ini hak untuk melakukan gugatan luas nama perseroan dapat dilakukan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dan jumlah seluruh saham, dengan hak suara yang sah ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi atau komisaris yang karena kesalahan atau kelalaian-nya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Apalagi dalam suatu perseroan yang terancam pailit atau perusahaan yang telah berada dalam tingkat kesulitan pembayaran utang yang bermaksud untuk mengajukan PKPU ataupun dalam usaha menyusun suatu rencana perdamaian (*composition plan*) kedepan yang menyangkut hidup matinya perusahaan, rencana perdamaian yang disusun

³¹ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Kasaint Blanco, 2002), hal. 46.

³² Ibid, hal. 46-47

jauh ke depan sebaiknya melibatkan seluruh organ perseroan termasuk para pemegang saham-saham perusahaan termasuk tentunya para pemegang saham minoritas sekalipun.

Adapun tata cara pengajuan perdamaian dalam rangka PKPU :

- a) Rencana perdamaian diajukan dapat berdamaian dengan diajukannya permohonan PKPU (Pasal 224 ayat (5)).
- b) Apabila rencana perdamaian diajukan sesudah permohonan PKPU diajukan, haruslah sebelum jatuhnya hari sidang selambat-lambatnya menurut ketetapan PKPU sementara yakni sebelum lewat batas waktu 45 hari, dan rencana perdamaian sebagaimana dimaksudkan tersebut harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan (dipungut) biaya (Pasal 229 ayat (3)) dan harus disampaikan kepada hakim pengawas dan pengurus serta ahli, bila ada secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia.
- c) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang, maka hakim pengawas harus menentukan ;
 - 1) Hari terakhir harus disampaikan kepada pengurus (Pasal 268 ayat (1a)).
 - 2) Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusutkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas (Pasal 268 ayat (1(b))).

- 3) Batas tenggang waktu antara point 1) dan 2) paling sedikit 14 (empat belas) hari (Pasal 268 ayat (2)).
- d) Pengurus wajib memberitahukan hal-hal yang disebut di atas (point c) kepada semua kreditor yang dikenal baik dengan surat tercatat maupun melalui kurir (Pasal 225 ayat (4)).
- e) Atas seluruh tagihan yang diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti-bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung dan atas tagihan yang diajukan kepada pengurus, kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus (Pasal 270 ayat (1 dan 2)).
- f) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, atau jika kreditor karena belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitor para kreditor harus menentukan penerimaan atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya (Pasal 228 ayat (4)).
- g) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap sebagaimana yang dimaksud di atas disetujui, maka penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari terhitung

sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran uang sementara ditetapkan (Pasal 228 ayat (6)).

- h) Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang berkekuatan hukum tetap, ternyata kemudian datang keputusan yang berisikan penghentian PKPU tersebut (Pasal 267).

3. PKPU Ditujukan Untuk Para Kreditor Konkuren

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku/ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Walaupun pada Undang-undang No.37 Tahun 2004 pada Pasal 222 ayat (2) tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 pada Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundasan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Namun pada Pasal 244 Undang-undang No. 37 tahun 2004 disebutkan : dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

- a) Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b) Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
- c) Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada point b.

Dengan demikian tegasnya. keseluruhan pemegang hak-hak jaminan yang memperoleh kedudukan didahulukan seperti gadai, *fiducia*, hak tanggungan, hipotik atau disebut kreditor separatis (yang disebut dengan istilah kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan) antara lain :³³

- a) Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III Undang-undang Hukum Perdata.
- b) Hipotek yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sekarang terbatas pada hipotek kapal laut ukuran tertentu, dan hipotek kapal terbang saja.
- c) Hak tanggungan diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996.
- d) Jaminan *Fiducia* diatur dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999.

Pemegang tagihan-tagihan yang diistimewakan (disebut dengan kreditor preferen adalah kreditor pemegang hak istimewa yang disebut

³³ Kartini Muliadi, Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja (Jakarta : Grafindo Persada, 2003), hal. 199.

dalam ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)³⁴. Pemegang hak istimewa atau pemegang *privelege* khusus dan karenanya ia adalah kreditor preferen mempunyai hak tagihan yang didahulukan, tagihan yang preferen atas hasil eksekusi benda tertentu milik debitor antara lain:³⁵

- a) Ongkos-ongkos pengadilan
- b) *Privelege* orang yang menyewakan.
- c) *Privelege* sipenjual
- d) Biaya menyelamatkan barang
- e) Biaya pembuatan (upah tukang)
- f) Hak istimewa pemilik rumah penginapan.
- g) Upah angkutan
- h) Hak istimewa para tukang batu, tukang kayu dan tukang bangunan,
- i) Hak istimewa atas penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memegang jabatan umum

Kesemuanya ini tidak berlaku untuk PKPU sebagaimana disebut dalam Pasal 244 jo. 246 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tersebut. Hal ini tentunya dikarenakan utang piutang para kreditor separatis telah dijamin oleh hak-hak kebendaan, jadi pembayarannya lebih bersifat pasti. Walaupun dalam Pasal 51, 57 dan 58 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang secara tegas dinyatakan berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan PKPU, sehingga seolah-olah hak kreditor separatis dan hak kreditor preferen diintervensi untuk melakukan eksekusi terhadap harta-harta debitor yang dikuasainya yang ditangguhkan untuk batas waktu 90 hari terhitung sejak keputusan pailit oleh pengadilan niaga ditetapkan.

³⁴ *Ibid*, hal. 202

³⁵ J. Satrio, Hukum Jaminan, *Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 41.

Sehingga praktis harta si pailit yang bisa dijual adalah terhadap barang-barang persediaan (*inventory*) ataupun barang-barang bergerak (Current asset) ataupun barang-barang tidak bergerak yang tidak dijamin dengan hak-hak tanggungan sebagaimana disebut diatas.

Hal tersebut menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya “Hak Tanggungan”, mengatakan :³⁶

Maksud penangguhan ini, bertujuan antara lain untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian dan untuk memperbesar untuk mengoptimalkan harta pailit, atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal selama berlangsungnya waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.

Penjelasan di atas terlihat bahwa sebagai bahan perbandingan diabaikannya kreditor separates dan kreditor preferen atas rencana perdamaian dalam hal PKPU pun, dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah atas pertimbangan keamanan kedudukan piutang kreditor, sehingga rencana perdamaian difokuskan pada kepentingan sekalian kreditor konkuren. Terkecuali apabila hasil eksekusi nantinya atas barang-barang yang dibebani dengan hak jaminan itu tidak cukup untuk membayar seluruh tagihan pihak kreditor, maka untuk sisa utang itu, kreditor separates tetap berhak untuk memperoleh pelunasan atas sisa tagihannya dengan kedudukan sebagai kreditor konkuren, yang bersama-sama dengan kreditor konkuren lainnya berhak memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, (Bnadung : Alumni, 1999), hal.163

kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan suatu hak jaminan, secara proporsional atau secara *pari passu* sesuai dengan perbandingan besarnya jumlah masing-masing utang dari para kreditor konkuren itu.

Walaupun PKPU ini hanya berlaku bagi para kreditor konkuren saja, tapi hasil seluruh kesepakatan mengenai rencana perdamaian tetap berlaku dan mengikat seluruh para kreditor baik kreditor konkuren maupun para kreditor separatis dan dalam pelaksanaan sidang-sidang senantiasa harus mengikut sertakan seluruh para kreditornya. Termasuk hak untuk mengeluarkan suara selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini berjalan, termasuk pula dalam menanggapi usul-usul rencana perdamaian.

Menurut Remy Sjahdeini Kesepakatan mengenai rencana perdamaian hanya mempunyai arti apabila setiap kreditor tenkat baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Apabila tidak setiap kreditor terikat dengan perdamaian yang tercapai, maka kedudukan debitor dan kepentingan para kreditor yang terikat dengan perdamaian tersebut dapat dibahayakan oleh kreditor yang tidak terikat yaitu kreditor preferen. Kreditor yang tidak terikat dengan perdamaian itu dapat mengajukan permohonan pailit. Apabila permohonan pailit ini dikabulkan oleh pengadilan, maka perdamaian yang telah disepakati antara debitor dan para kreditor konkuren dan sedang berjalan implementasinya akan harus dihentikan”.³⁷

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Op.Cit., hal. 327 s/d 328.

Tentunya hal ini tergantung juga pada keberadaannya yang menentukan dari sekian banyak kreditor, andaikata jumlah kreditor mayoritasnya konkuren tentu sulit dalam hal perbandingan pengambilan jumlah suara yang tentunya kedudukan para kreditor separatis dapat dikalahkan atas usulan diterima atau ditolaknya rencana perdamaian tersebut.

Pada Undang-undang Tahun 2004 pada Pasal 229 disebutkan jika dilakukan voting dalam pemberian PKPU dan persetujuannya diterima, ditolaknya rencana perdamaian maka suara dimenangkan oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara yang diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut dan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan, *fiducia*, hak tanggungan, hak agunan atas benda lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dan seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

4. PKPU yang Dikabulkan Harus Memenuhi Asas Publisitas

Pihak debitor yang menjalankan suatu usaha baik usaha yang bersifat perorangan atau perseroan acapkali memiliki keterkaitan hubungan

yang sangat luas tidak hanya terhadap para kreditornya, tetapi juga pihak-pihak lainnya dan tidak tertutup kemungkinan pihak debitor memiliki hubungan yang sangat banyak baik sebagai kreditor maupun sebagai mitra kerja apalagi pada perusahaan yang *go public*, oleh karena itu didalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 sekarang ini, perusahaan yang telah *go public* maupun perusahaan yang bergerak bagi kepentingan publik, pemailitan maupun pada tahap pengusulan PKPU harus mendapat izin pihak tertentu. Dalam Pasal 223 disebutkan bahwa terhadap debitor

- a) Bank
- b) Perusahaan Efek, Bursa Efek,
- c) Lembaga kliring dan penjamin.
- d) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian
- e) Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi.
- f) Dana pensiun.
- g) BUMN yang bergerak bagi kepentingan publik
- h) Izin pihak tertentu dimaksud adalah :
 - 1) Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit dan PKPU dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
 - 2) Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit dan PKPU oleh izin Badan Pengawas Pasar Modal.

- 3) Dalam hal debitor perusahaan yang bergerak pada bidang asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak bagi kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dan PKPU diajukan Oleh Menteri Keuangan.

Walaupun hal ini sebenarnya dicantumkan dalam undang-undang yang baru Undang-undang No. 37 Tahun 2004 adalah mengingat pengalaman pada peristiwa pemailitan yang lalu yang terjadi pada perusahaan yang telah *go public* maupun pada perusahaan yang berkaitan dengan publik yang cukup menghebohkan kepada masyarakat umum seperti yang terjadi pada perusahaan asuransi *Manulife* dan perusahaan *Prudential Life Assurance*, walaupun pencantuman pasal perundang-undangan ini mendapat protes keras dari kalangan praktisi hukum.

Mengingat keterlibatan banyak pihak tersebut (publik) maka, undang-undang mewajibkan begitu permohonan PKPU sementara diputus oleh pihak pengadilan niaga pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan, kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut pengumuman tentang tanggal, tempat dan waktu sidang, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus dan apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian

(*composition plan*), maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang direncanakan. Demikian juga dalam halnya telah disetujuinya PKPU tetap dan pengesahan rencana perdamaian maka keputusan tersebut harus diumumkan dengan cara sebagaimana disebut di atas.

5. PKPU Sementara dan PKPU Tetap

Sepanjang debitor telah memenuhi syarat-syarat dalam permohonan PKPU antara lain :

- a) Permohonan telah diajukan melalui kuasa hukumnya (*advokat*) yang memiliki izin praktek, dengan alasan permohonan yang cukup (terurai jelas maksud dan alasan permohonan PKPU tersebut disertai lampiran bukti-bukti pendukung secukupnya seperti daftar yang memuat sifat dan jumlah piutang).
- b) Pada surat permohonan dimaksud di atas dapat dilampiri deh rencana perdamaian (*composition plan*) jika telah disiapkan oleh pihak pemohon.
- c) Telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat dan bila mungkin surat permohonan dimaksud disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- d) Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat

permohonan, sebagaimana dimaksud di atas hakim harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara untuk batas waktu 45 hari dan harus menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitor mengurus harta si debitor.

- e) Dalam permohonan yang diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan tersebut, harus mengabulkan permohonan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama-sama debitor mengurus harta debitor tersebut.

Segera setelah ditetapkannya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 terhitung setelah keputusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan niaga, maka pengadilan terlebih dahulu akan memutus PKPU sementara kepada debitor sebelum PKPU tetap. Adapun tujuan PKPU sementara ini adalah :

- a) Agar segera tercapai keadaan diam (*stay atau standstill*)³⁸ sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditor dengan debitor menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitor.
- b) Memberi kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya.

PKPU sementara berlaku sejak tanggal PKPU sementara tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang paling lambat diselenggarakan pada hari ke 45 terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan. PKPU tetap, lahir setelah proses sidang dimaksud di atas dilaksanakan dan keputusan sidang menetapkan bahwa PKPU sementara diputus menjadi PKPU tetap. Setelah PKPU tetap ini disetujui oleh para kreditor maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak boleh melebihi batas waktu 270 hari sudah termasuk perpanjangannya terhitung sejak penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.

³⁸ Keadaan diam *stay* atau *standstill* dimaksud berlangsung selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap, pada masa ini debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya lagi. Selain itu, Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan dan semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitor disandera, debitor harus segera dilepaskan segera setelah diucapkan kaputusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah keputusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap (*Ibid*, hal. 344).

Pada hakekatnya PKPU tetap diberikan oleh para kreditor dan bukan oleh pengadilan niaga, dengan kata lain PKPU tetap diberikan berdasarkan kesepakatan oleh para debitor dan para kreditornya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Dan pengadilan niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi raja atas kesepakatan antara debitor dan para kreditor konkuren tersebut. Tidak dibenarkan bagi pengadilan niaga untuk mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan debitor dan para kreditornya.³⁹

Sering terjadi kekeliruan penafsiran seolah-olah batas waktu 270 hari bagi PKPU tetap yang diberikan merupakan batas waktu penyelesaian utang debitor kepada sekalian kreditornya, mengenal hal ini menurut Sutan Remy Sjahdeini tidaklah demikian, namun beliau menjelaskan :⁴⁰

“Haruslah dicermati bahwa PKPU tetap itu berbeda dengan pengertian jangka waktu *rescheduling* utang sebagaimana istilah itu dikenal dalam industri perbankan. Jangka waktu 270 hari itu adalah jangka waktu bagi debitor dan para kreditor konkurennya untuk merundingkan perdamaian diantara mereka. Sebagai suatu hasil perdamaian yang harus dicapai dalam waktu tidak lebih dari 270 hari itu, mungkin saja dihasilkan perdamaian untuk memberikan *rescheduling* bagi utang debitor untuk jangka waktu yang panjang, misalnya sampai 5 atau 8 tahun. Dengan demikian masa PKPU yang berjangka waktu tidak lebih dari 270 hari itu, adalah jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dengan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor”.

PKPU tetap, ditetapkan oleh pengadilan niaga berdasarkan kepada persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dan

³⁹ *Ibid.*, hal 341

⁴⁰ *Ibid.*, hal 340 s/d 341

mewakili paling sedikit 213 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dan apabila timbul perselisihan perihal hak suara kreditor ini, maka penyelesaiannya diputus oleh hakim pengawas.

6. Penyebab Berakhirnya PKPU

Setelah PKPU diberikan, PKPU itu dapat diakhiri baik atas permintaan hakim pengawas atau atas permohonan pengurus atau atas permohonan satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan sendiri dalam hal-hai sebagai berikut:

- a) Debitor selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya (Pasal 255 ayat (1 a)).
- b) Debitor telah atau mencoba merugikan para kreditornya (Pasal 255 ayat (1b)).
- c) Debitor melakukan pelanggaran selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dan jika debitor melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut (Pasal 225 ayat (1c)) juncto Pasal 240 ayat (1).
- d) Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan

kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitor (Pasal 255 ayat (1d)).

- e) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang pada harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 255 ayat (1e)),
- f) Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya (Pasal 255 ayat (1f)).

Dalam hal debitor beritikad buruk dalam masa PKPU terhadap kepengurusan harta bendanya, sehingga demikian rupa harta si debitor ternyata tidak mampu lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, maka pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU, namun tentunya debitor dan pengurus harus didengar terlebih dahulu oleh pihak pengadilan, dan jika PKPU ini diakhiri berdasarkan hal demikian, maka debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang lama.

Permohonan pengakhiran PKPU sebagaimana, dimaksud di atas harus selesai diperiksa oleh pengadilan dalam jangka waktu 10 hari dan putusan pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 hari sejak selesainya pemeriksaan. Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut. Disamping itu debitor setiap waktu dapat pula memohon kepada pihak pengadilan agar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dicabut dengan alasan bahwa harta debitor

memungkinkan dimulainya kembali pembayaran utang-utangnya dengan ketentuan bahwa pengurus dan kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.

Pada masa diberlakukannya ketentuan *Faillissement Verordening* yakni pada Pasal 244 ayat (1) FV, setiap waktu debitor berhak memohonkan kepada pengadilan niaga agar PKPU dicabut dengan alasan bahwa pada keadaan harta debitor sudah sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat melakukan pembayaran-pembayaran lagi. Untuk keperluan itu, keterangan para pengurus dan para kreditor akan didengar dan kepada mereka harus dipanggil secara layak.

7. Pengesahan Rencana Perdamaian oleh Pengadilan Niaga

Terhadap rencana perdamaian yang disampaikan oleh pihak debitor sepanjang telah memenuhi kesepakatan para pihak dan rencana perdamaian tersebut dibuat tanpa ada unsur penipuan dan persengkokolan dengan satu atau lebih kreditor, maka pada prinsipnya pihak pengadilan akan mengesahkan rencana perdamaian tersebut, namun tentu terlebih dahulu akan melakukan konfirmasi mengenai hasil kesepakatan antara si debitor dan kreditornya terhadap rencana perdamaian tersebut. Oleh karenanya dalam menyusun rencana perdamaian tersebut, pihak debitor harus betul-betul memperhatikan kepentingan para kreditornya. Sebab jika rencana perdamaian yang dibuat hanya memberi keuntungan dari sisi si

debitor saja, dan kurang memperhatikan kepentingan pihak kreditornya, maka besar kemungkinan pihak kreditor akan menolak rencana perdamaian tersebut yang berakibat pihak debitor tersebut akan dipailitkan. Dalam hal rencana perdamaian tersebut telah terdapat kesepakatan antara pihak kreditor dan debitor, tapi belum mendapat pengesahan dari pihak pengadilan niaga melalui surat keputusannya, maka rencana perdamaian tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan belum sah mengikat para pihak. Sebagai bahan perbandingan : “Menurut sistem *Bankruptcy Code*, hakim bebas untuk menerima atau mengesahkan atau untuk menolak untuk memberikan pengesahan terhadap *reorganization plan* tersebut tanpa harus memperhatikan apakah plan itu telah diselujui atau telah ditolak oleh para kreditor dalam negosiasi kesepakatan antara debitor dan para kredatornya”.⁴¹

Namun dalam sistem *Bankruptcy Court* keputusan pengadilan diambil setelah terlebih dahulu melakukan *hearing* (dengar pendapat) dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan hasil *hearing* ini nantinya memberi kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan, jika masih ada keberatan yang dijumpai. Cara ini dilakukan agar rencana perdamaian yang telah diputus oleh pihak pengadilan nantinya benar-benar kokoh untuk mengikat dan dilaksanakan oleh para pihak. Dan segera setelah keputusan tentang pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka perdamaian tersebut mengikat semua kreditor konkuren tanpa

⁴¹ *Ibid*, hal. 383.

terkecuali, baik kreditor yang telah menyetujui, maupun yang belum menyetujui rencana perdamaian itu. “Namun sebaliknya dalam hal rencana perdamaian ditolak kreditor *konkuren* atau apabila rencana perdamaian ditolak oleh pengadilan, maka pengadilan niaga wajib menyatakan debitor pailit dan terhadap putusan kepailitan tersebut, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.

C. Restrukturisasi Utang Dalam Hukum Kepailitan

Pelaksanaan restrukturisasi utang di Indonesia, diatur dalam UUK di bagian PKPU. Undang-undang Kepailitan tidak mengatur rincian apa saja yang diatur dalam suatu rencana perdamaian. Pada dasarnya kedua belah pihak, kreditor maupun debitor, bebas menentukan bagaimana mekanisme penyelesaian pembayaran utang diantara mereka.⁴² Adanya kelemahan di dalam Undang-Undang Kepailitan yang mana Undang-Undang Kepailitan tidak cukup mengatur mengenai restrukturisasi utang. Belum ada payung hukum yang jelas mengenai perusahaan yang bagaimana yang berhak di restrukturisasi atau bagaimana bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat di tempuh dan hal-hal teknis lainnya.

Kepailitan suatu perusahaan menurut Undang-Undang Kepailitan dapat disebabkan oleh berbagai alasan, sebagai berikut :

⁴² Aria Suyudi, Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004). hal. 205.

1. Ketidakmampuan debitor yang dimohonkan pernyataan pailit untuk membayar utang- utangnya yang telah jatuh tempo, yang di sebabkan oleh karena :

a. Krisis moneter yang telah mengakibatkan kesulitan keuangan.

Krisis moneter sejak tahun 1997 menyebabkan banyak perusahaan gagal beroperasi.

b. Secara nyata harta kekayaan (aset) perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban (*debt*) perseroan.

2. Perseroan tidak mau membayar utang-utangnya karena berbagai alasan, antara lain :

a. Pihak lawan juga belum menyelesaikan kewajibannya (*exceptionon adempti contractus*);

b. Pengalihan piutang dianggap tidak sah menurut debitor;

c. Direksi yang mewakili perseroan tidak berwenang untuk mengikat perseroan dengan pihak ketiga;

d. Utang dianggap belum jatuh tempo oleh debitor;

e. Telah diadakan penjadwalan kembali utang;

f. Utang dianggap telah dibayar oleh debitor.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai harta kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Adanya pernyataan pailit oleh pengadilan mengakibatkan badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus

harta kekayaannya, karena hak pengurusan harta kekayaan perseroan beralih kepada kuratornya. Menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, gugatan hukum yang bersumber kepada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan kepada kuratornya.

Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitor. Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.⁴³ Akibat hukum lain bagi perseroan adalah bahwa debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan terhitung sejak saat putusan pailit diucapkan.⁴⁴

Akibat hukum putusan pailit mempunyai konsekuensi terhadap harta pailit perseroan (debitor). Semua perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.

Gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara

⁴³ Bismar Nasution dan Sunarmi, *Diktat Hukum Kepailitan*, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana USU, Medan, 2003, hal. 54.

⁴⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 85

langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan. Dalam hal pencocokan tidak disetujui, pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitor pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung. Gugatan tersebut hanya mempunyai akibat hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal ini sudah cukup untuk menjadi salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluarsa atas hak dalam gugatan tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

1. Duduk Perkara

PT. ANUGERAH TIARA SEJAHTERA (selanjutnya PT. ATS), berkedudukan di Jakarta, digugat pailit oleh PT. BANK BUKOPIN, Tbk. untuk keperluan pengembangan usahanya yang bergerak di bidang perdagangan umum dan industri air minum dalam kemasan. PT. ATS juga mempunyai utang kepada kreditor lain yaitu Erwan M dan PT. ATS dengan beritikad baik masih tetap ingin melakukan pembayaran kepada kreditor termasuk PT. Bank Bukopin.

2. Putusan Pengadilan Niaga

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, menyebutkan bahwa :

1. berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (4) UUK dan PKPU, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU PT. ATS. melalui putusan nomor: 04/PKPU/2009/PN.NIAGA.Jkt.Pst mengabulkan permohonan PKPU dari para Kreditor;
2. ketentuan Pasal 227 UUK dan PKPU;
3. ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UUK dan PKPU;
4. ketentuan Pasal 225 ayat 58 ayat (4) UUK dan PKPU;

5. ketentuan Pasal 229 ayat (3) UUK dan PKPU;

sehingga putusan Pengadilan Niaga adalah Keputusan final ("*inkracht*") yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada 11 September 2009.

B. Lembaga PKPU Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditornya Pada Kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdiri dari Permohonan PKPU murni (*voluntarily*) dan permohonan PKPU tidak murni (*involuntarily petition*). Permohonan PKPU murni diajukan oleh debitor sebagai pemohon, tanpa menarik pihak lain (kreditor) sebagai termohon. Inisiatif berpekara ada pada debitor, sedangkan permohonan PKPU tidak murni adalah permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor sebagai tangkisan atau counter terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor, inisiatif berpekara ada pada kreditor.

Permohonan PKPU dikabulkan oleh pengadilan Niaga, maka terhindarlah dari kepailitan, dimana dalam permohonan PKPU disertai dengan rencana perdamaian. Dalam rencana perdamaian tersebut, pada umumnya debitor memohon kepada kreditor untuk merestruktursasi utang-utangnya. Ada dua jenis utama restrukturisasi yaitu :⁴⁵

1. Restrukturisasi finansial atau restrukturisasi utang
2. Restrukturisasi operasional.

⁴⁵ Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehaiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000) Hal. 20

Perihal pelaksanaan PKPU ini dari segi yuridis formil secara garis besar menurut penulis telah terlaksana dalam proses peradilan yang memenuhi pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tinjauan dari sudut pelaksanaan menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004. Kriteria ini didasarkan pada latar belakang penilaian :

1. Pengajuan permohonan PKPU oleh debitor melalui kuasa hukumnya yang telah memenuhi syarat-syarat pengajuan PKPU sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
2. Batas waktu penerimaan dan keputusan ditolak atau diputus/diterimanya permohonan PKPU yaitu mulai dari permohonan didaftarkan sampai penentuan masa sidang dan pemberian PKPU sementara maksimal 45 hari dan PKPU tetap berikut perpanjangannya 270 hari.
3. Peranan hakim pengawas, pengurus, debitor dan kreditor dan penjadwalan sidang dalam rangka membahas rencana perdamaian baik semasa PKPU sementara maupun pada PKPU tetap, berikut segala ketentuan hak ketentuan hak pengambilan suara baik secara musyawarah mufakat maupun prosedur *voting*.
4. Ketentuan-ketentuan melakukan pengumuman yang telah diisyaratkan oleh undang-undang untuk memenuhi asas publisitas demi kepentingan sekalian kreditor, masyarakat umum dan pihak ketiga lainnya.
5. Pengesahan perdamaian yang telah diputus/sepakat para pihak telah memenuhi pasai perundang-undangan.

6. Penggunaan upaya hukum menurut ketentuan undang-undang kepailitan.
7. Pengawasan pengadilan dalam pelaksanaan PKPU dalam proses *rescheduling* utang.

Namun jika ditinjau dari segi penerapan hukum positif dan uji materil terhadap kasus-kasus yang penulis tetiti menurut analisa penulis, masih memungkinkan menjadi bahan perdebatan, dalam kajian dan analisis tinjauan hukumnya.

Hal pokok yang mejadi penting adalah langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh debitor dan pengurus dalam hal rencana perdamaian diterima. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa kemungkinan besar ditolak atau diterimanya suatu rencana perdamaian dalam rangka PKPU sangat tergantung pada bentuk rencana perdamaian yang ditawarkan oleh si debitor tersebut apakah layak/*feasible* dan sejauh mana bermanfaat atau memberi keyakinan pada pengembalian sekalian piutang para kreditornya.

Agar suatu rencana perdamaian itu dikatakan *feasible* tentunya dalam rencana perdamaian tersebut terlihat atau tergambar antara lain :

1. Sejauhmana usaha si debitor masih memiliki prospek untuk diselamatkan dengan kata lain apakah langkah-langkah yang disepakati masih memungkinkan usaha si debitor bangkit kembali atau sehat kembali dari kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya saat ini.
2. Disamping itu para kreditor harus yakin bahwa melalui cara PKPU ini, nantinya piutang-piutang para kreditor tersebut memungkinkan untuk dapat dilunasi dan lebih menguntungkan dilakukan melalui PKPU inu ketimbang

debitor dinyatakan pailit, yang sudah jelas bagi para kreditor konkuren tidak memungkinkan atau sangat tipis kemungkinannya dapat menerima pengembalian uangnya secara penuh.

3. Sifat utang dari si debitor, berikut segala jenis bentuk perjanjian yang pernah dibuat antara si debitor dengan pihak kreditornya, baik terhadap kreditor *konkuren* maupun terhadap kreditor *preferen* dan berikut cara-cara penjaminannya yang dilakukan.
4. Kelayakan harta si debitor, kondisi sifat kebendaan maupun piutang-piutang atau dengan kata lain segala aktiva dan passiva dari si debitor.

Faktor-faktor yang penyelamatan diatas, sangat menentukan bagi upaya penyelamatan usaha si debitor dan sangat menentukan dalam upaya pemberian jangka waktu dalam restrukturisasi dan rescheduling utang-utangnya. Disamping itu langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengurus dan debitor adalah memahami hambatan-hambatan apa yang urgen penyebab si debitor mengalami *insolven* selama ini, sehingga mudah dan lebih memfokuskan penyelamatan usaha si debitor keluar dari krisis keuangannya.

Sebagai bahan perbandingan, berikut disampaikan hal-hal penyebab suatu kredit macet antara lain :⁴⁶

1. Penyalahgunaan fasilitas kredit oleh debitor.
2. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari pihak kreditor kepada debitor.
3. Gagalnya usaha debitor atau bangkrut yang diakibatkan persaingan yang tajam, profesionalisme yang kurang dan akibat dituar kemampuan manusia.
4. Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan dunia usaha.
5. Itikad yang kurang baik dari debitor itu sendiri.

⁴⁶ S. Mantayborbir, Iman Jauhari, Agus Hari Widodo, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, (Medan : Pustaka Bangsa, 2002), hal. 24.

6. Memang usaha debitor tidak mampu lagi untuk membayar angsuran maupun pelunasannya.
7. Terjadinya krisis moneter yang menyebabkan usaha debitor tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
8. Perangkat hukum atau peraturan tidak mendukung pelaku ekonomi.
9. Lingkungan yang tidak aman untuk berusaha.
10. Kebijakan moneter dan fiskal.
11. Debitor tidak mampu untuk mengelola kredit yang diterimanya atau kemampuan manajemen debitor kurang (lemah)

Diajukannya PKPU ini oleh debitor, sebenarnya posisi perusahaan si debitor sudah berada diambang kepailitan, sehingga dalam proses pengajuan langkah-langkah perdamaian dalam PKPU tetap, nantinya perlu dilakukan beberapa hal yang amat penting antara lain perlunya dilakukan “prinsip-prinsip keterbukaan, dari pihak debitor perihal keberadaan perusahaannya, dimana keterbukaan informasi ini memungkinkan para kreditor untuk apakah menyetujui atau tidak menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan. Dan informasi ini memungkinkan para kreditor mengambil sikap terhadap usulan reorganisasi, melakukan tawar-menawar apakah rencana reorganisasi ini dapat diterima, terlebih lagi dalam proses PKPU tetap, hal reorganisasi ini sangat luas cakupannya. Ada 3 hal penting dilakukannya prinsip keterbukaan ini :⁴⁷

1. Keterbukaan itu berguna, untuk memungkinkan kreditor melakukan atau tidak melakukan pembayaran yang telah dilakukan kepada kreditor lainnya, kepada insider atau teman-teman debitor.
2. Informasi itu memungkinkan kreditor mengambil sikap terhadap rencana atau usulan reorganisasi atau likuidasi.

⁴⁷ David G. Epstein, Steve H. Nickles dan James J. White, Bankruptcy (ST. Paul. Mine : West Publishing Co, 1993, hal. 819 (dikutip dalam *Hukum Kepailitan*), Bismar Nasution, Sunarmi, Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana USU, 2003, hal. 139.

3. keterbukaan tersebut memungkinkan kreditor melakukan tawar menawar terhadap rencana dan keputusan akhir apakah menyetujui atau menolak rencana tersebut

Sebagian besar keputusan kreditor untuk menerima atau menolak rencana tersebut tergantung pada 4 (empat) pertanyaan sebagai berikut:⁴⁸

1. Apakah rencana *feasible*.
2. Seberapa besar nilai (kalau ada) yang diberikan rencana tersebut kepada kreditor.
3. Apakah kreditor menerima bagiannya secara adil dari pembagian nilai-nilai yang tersedia.
4. Apakah bentuk pemberian nilai tersebut dapat diterima.

Sehubungan dengan kasus-kasus yang melanda perekonomian Indonesia dipertengahan tahun 1997 yang berdampak pada banyaknya perusahaan-perusahaan dalam negeri yang *collaps*, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP No. 27 Tahun 1998 tentang Restrukturisasi Perusahaan yang khusus menyangkut penggabungan, peleburan dan pengambil alihan Perseroan Terbatas), namun walaupun konsep restrukturisasi dan reorganisasi tersebut terbatas dalam lingkup bentuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas saja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, namun dalam praktek perbankan langkah-langkah pemulihan utang dapat merujuk pada konsep-konsep tersebut.

Langkah-langkah penyelamatan usaha sidebitor dapat diupayakan dalam berbagai bentuk kegiatan yang biasa dikenal dengan istilah restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan. Hal ini adalah upaya untuk

⁴⁸ Mark S. Scarbery, Kenneth N. Klee, Grant W. Newton dan Steve H. Nickles, *Busines Reorganization In Bankruptcy*, (St. Paul Minnesota : West Publishing Co, 1996, hal. 789) (dikutip dalam *Hukum Kepailitan*), Bismar Nasution, Sunarmi, Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana USU, 2003, hal. 139.

mengatur kembali strategi perusahaan. Khusus yang berkaitan dengan masalah utang ini ada berbagai-bagai bentuk aplikasi yang dapat dilakukan yaitu :⁴⁹

1. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor.
2. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*).
3. Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*)
4. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak,
5. denda, dan biaya-biaya lain.
6. Penurunan tingkat suku bunga.
7. Pemberian utang baru.
8. Konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut juga *debt equity swap*).
9. Penjualan asset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang.
10. Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukses tidaknya suatu rencana perdamaian, sangat tergantung pada peranan yang diberikan oleh para kreditor dalam membantu usaha debitor, oleh karenanya kesepakatan yang diperoleh antara kreditor dan debitor yang tertuang dalam draft perdamaian yang akan dijalankan, memegang kunci berhasil tidaknya sidebitor dipulihkan dari keadaan yang insolven tersebut. Oleh karenanya didalam kesepakatan yang diambil antara sidebitor dengan kreditor tersebut setidaknya mencakup hal sebagai berikut :

1. Tenggang waktu yang diberikan dalam upaya penyelamatan usaha sidebitor, tenggang waktu ini memegang peranan yang menentukan bagi upaya sidebitor untuk dapat memulihkan kembali usahanya.

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Op.Cit, hal. 368.

2. Sikap toleransi para kreditor dalam menjadwal, merestrukturisasi utang debitor sedapatnya tidak memandang dari sisi kepentingan para kreditor raja, tapi jika memungkinkan harus lebih banyak mengacu pada kondisi debitor.
3. Para kreditor tidak lagi memandang semata pada profit bisnis, sebab bagaimanapun kondisi debitor berada pada posisi yang lemah.

Disamping itu tentunya kecakapan pengurus untuk bersama-sama debitor, harus senantiasa sejalan dalam mengupayakan/merealisasikan rencana perdamaian dan pengurus senantiasa bersikap independen dalam melihat sisi kepentingan debitor dan para kreditornya. Disamping itu pihak pengadilan juga penting khususnya hakim pengawas dalam memberikan petunjuk dan tindakan yuridis.

Diterimanya permohonan PKPU yang dimohonkan debitor, yang berarti telah disepakatinya langkah-langkah perdamaian antara kreditor dan sekalian kreditornya, maka terbuka suatu kesempatan bagi debitor untuk memulihkan usahanya dan menghindar dari ancaman kepailitan. Sidebitor yang karena satu dan lain hal mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya, khususnya dalam membayar sekalian utang-utangnya yang telah jatuh tempo, kembali mendapai angin segar untuk menata kembali usahanya berdasarkan pada potensi baru, baik potensi yang diperoleh dari langkah-langkah penjadwalan utang (*rescheduling*), bahkan mungkin mendapat potensi tambahan modal baru (rekapitalisasi), sehingga modal tersebut dapat

digunakannya untuk menggerakkan kembali roda perusahaan. Namun tentu saja hal ini semua dijalankannya dalam mekanisme manajemen yang baru.

Mekanisme tersebut dimaksud :

1. Jika dahulu sidebitor mengelola usaha yang sekaligus merupakan pihak pengurus yang berwenang penuh dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya, maka sekarang ini sidebitor didampingi oleh pengurus yang baru untuk bersama-sama melakukan kerjasama pengurusan perusahaan dan bersama-sama bertanggungjawab khususnya dalam masa PKPU ini, sampai dengan lunasnya nanti utang-utang debitor atas sekalian kreditornya. Dan dalam pengurusan ini, debitor dan pengurus tidak dapat bertindak sendiri-sendiri (lihat ketentuan Pasal 240 ayat (1)),
2. Dalam melakukan pengurusan perusahaan tersebut, pihak debitor dan pengurus mendapat pengawasan dari pihak pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim pengawas.
3. Sidebitor telah memperoleh pengalaman dari kesaiahan/kegagalan kepengurusannya selama ini, yang akan diperbaiki sehingga lebih mampu untuk memecahkan dan menghindari salah yang sama tidak terulang lagi.

Namun dibalik peluang-peluang yang didapatkannya ini, untuk memulihkan usahanya tentu saja banyak hal-hal yang senantiasa suka atau tidak sutra harus diterimanya sebagai konsekwensi dari diterapkannya suatu rencana perdamaian yang ketentuannya harus dijalankan antara lain :

1. Sidebitor harus menjalankan semua ketentuan-ketentuan dari kesepakatan bersama termasuk melaksanakan reorganisasi dan merestrukturisasi perusahaannya, yang mana mungkin berakibat harus mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan sebagian kecil atau sebagian besar karyawannya.
2. Menambah sejumlah utang baru yang harus dipertanggungjawabkannya
3. Mendapat pengawasan yang sangat ketat dari berbagai pihak lain seperti pengurus, atau dewan pengurus, para kreditor, hakim pengawas.
4. Harus menerapkan sistem management yang sangat efisien (resiko bagi perusahaan yang pernah insolven dan masih terlilit utang).
5. Berpacu dengan jangka waktu PKPU yang telah disepakati misalnya penjadwalan utang (*rescheduling*) untuk waktu yang telah ditetapkan.
6. Sidebitor bekerja keras bukan lagi semata-rata untuk mencari keuntungan perusahaannya tapi terprogram untuk tujuan membayar utang.

Untuk memulihkan utang-utangnya, langkah PKPU ini jelas relatif lebih baik jika ditinjau dari beberapa hal :

1. Sidebitor lepas dari peristiwa kepailitan, yang mana hal ini sangat ditakuti oleh para pengusaha karena dampaknya sangat luas baik terhadap karir sidebitor selaku pengurus perusahaan, maupun terhadap sekalian harta kebendaannya dan juga terhadap sekian banyak nasib karyawan dan relasi-relasinya yang mungkin untuk menghimpun dan membinanya memerlukan kerja keras dan waktu yang lama.

2. Pemberesan harta sipailit berarti kepunahan baik dalam harta benda perusahaan maupun nama baik debitor walaupun nantinya ada langkah-langkah rehabilitasi disediakan oleh undang-undang. Melalui PKPU ini, selama batas waktu yang telah disepakati pihak debitor dan pengurus tidak tagi direpoti oleh gangguan dari kreditor-kreditornya dengan kata lain para kreditor tidak lagi melakukan upaya yang merepoti kerja sidebitor, karena semua masalah telah dijadwal atas hasil kesepakatan bersama dan keputusan perdamaian tersebut bersifat mengikat sehingga situasinya akan jauh berbeda pada saat sidebitor berada dalam kondisi sebelum PKPU ini dijalankan yang mana sewaktu-waktu pihak kreditornya dapat mengganggu aktivitas kerja perusahaan bahkan sewaktu waktu dapat memohonkan sidebitor pailit.

Menurut Pasal 239 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, pengurus diwajibkan untuk setiap 3 bulan sekali melaporkan jalannya perusahaan dan harta sidebitor. Laporan tersebut harus disediakan di kantor Panitera Pengadilan Niaga agar dapat diperiksa oleh umum tanpa biaya. Apabila umum/publik menginginkan untuk memperoleh laporan tersebut, hal itu dapat pula diperoleh tanpa dipungut biaya.

Pelaporan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 239 ayat (1) sifatnya tidaklah terlalu ketat, karena bilamana keadaan memerlukan perpanjangan waktu masih dapat dibenarkan oleh ketentuan pasal 239 pada ayat 2, dimana misal akibat keadaan keuangan debitor yang cukup rumit, maka jangka waktu

pelaporan ini dapat diperpanjang. Namun hal ini harus diberitahu kepada hakim pengawas terlebih dahulu yang penting dalam hal ini mekanisme pengawasan oleh pihak pengadilan tidak terabaikan dimana ketentuan seperti ini dalam undang-undang kepailitan yang lama tidak tercantum.

Dalam sistem management perusahaan hal yang paling penting adalah sikap menjaga hubungan baik dengan para relasi. Publik dan relasi adalah jantung kehidupan bagi suatu perusahaan, dari suatu perusahaan yang baik apalagi yang bonafide sangat menjaga bentuk-bentuk hubungan atau jalinan hubungan baik ini dengan para relasinya.

Tidak jarang suatu perusahaan yang baru berkembang atau dalam taraf memulai usahanya menghabiskan dana dan biaya yang cukup banyak hanya untuk mencari dan menjalin hubungan dengan para relasi dan publik konsumennya. Misalnya dengan menghabiskan uang yang banyak untuk kegiatan *advertising*, bagaimana agar perusahaan tersebut dapat dikenal oleh anggota masyarakat publik, termasuk menjalin hubungan dengan para karyawannya, melakukan training-training untuk keterampilan para karyawan, usaha-usaha mengembangkan distribusi perdagangan, membuka cabang-cabang baru dan sebagainya.

Pokoknya akan banyak sekali relasi bisnis yang diperlukan oleh pihak perusahaan yang ingin memajukan usahanya. Oleh karenanya dengan terbebasnya sidebitor dan kepailitan walaupun harus melaksanakan PKPU ini, telah merupakan hal yang sangat baik bagi perusahaan tersebut. Apalagi jika

usaha PKPU ini, terlaksana dengan baik sehingga sampai pada waktunya nanti diharapkan dapat dikembalikannya segala utang-utang sidebitor kepada seluruh kreditornya, maka manfaat PKPU ini akan sangat menolong bagi pihak perusahaan dengan demikian juga pada akhirnya sangat menolong bagi pihak kreditor yang sangat mengharapkan piutangnya dibayar kembali secara utuh oleh sidebitor.

Dalam praktek ternyata peranan para pihak sebagaimana disebut diatas cukup berperan aktif, terutama sekali draft dari rencana perdamaian yang disampaikan oleh debitor, karena bagaimanapun pihak debitorlah yang paling mengetahui tentang keberadaan perusahaannya, apakah masih cukup *feasible* untuk maju ke depan dan langkah-langkah apa senantiasa untuk diambil keputusan segera yang diharapkan nantinya mendapat persetujuan dari para kreditor yang memiliki piutang dan hak tagih pada perusahaan sidebitor tersebut.

Walaupun peranan para kreditor untuk menyepakati isi draft perdamaian tersebut sangat menentukan nantinya, apakah bagi permohonan sidebitor dapat diberikan penundaan pembayaran utang tersebut. Walaupun fokus untuk dapat diberikannya persetujuan PKPU kepada sidebitor nantinya memang sangat tergantung kepada kesepakatan para kreditor.

Rencana draft perdamaian yang diusulkan oleh pihak debitor tentunya tidak serta merta mendapat persetujuan oleh para kreditor, untuk ini banyak faktor-faktor tentunya perlu mendapat evaluasi termasuk faktor yang

menentukan adalah kelayakan (*feasibilitas*) perusahaan sidebitor apakah masih memungkinkan untuk diberikan PKPU dan mendapat restrukturisasi berjalannya perusahaan ke depan.

Evaluasi penitain seperti ini tentulah terkadang memerlukan sikap kehati-hatian dan juga banyak tergantung kepada hasil auditing yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengaudit tentang keberadaan perusahaan sidebitor tersebut dan tidak bertumpu pada rencana-rencana atau usulan-usulan yang disampaikan oleh pihak debitor semata-mata. Apakah perusahaan tersebut masih memiliki cukup prospek untuk mendapatkan restrukturisasi dan *scheduling* atas utang-utang debitor kepada sekalian pihak kreditornya. Disinilah terkadang kesulitan untuk memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang baik dalam pemberian waktu dalam PKPU sementara (45 hari) dan juga waktu 270 hari selama PKPU tetap sudah termasuk Batas waktu perpanjangannya dimana dalam konteks waktu tersebut kesepakatan para pihak harus senantiasa tercapai.

Disamping itu ketentuan Undang-Undang yang juga mengatur tentang peranan hakim pengawas dalam proses pemberian PKPU ini di Pengadilan Niaga setempat. Sebagaimana halnya Undang-Undang yang mengatur tentang peranan kedudukan hakim pengawas yang secara yuridis sebenarnya cukup berperan sebagai menjembatani antara kepentingan pihak debitor dan kreditornya.

Hakim pengawas semestinya dapat memberikan usulan-usulan yang lebih konkrit terhadap draft perdamaian yang akan disepakati oleh para pihak nantinya, agar rencana perdamaian yang akan disahkan nantinya tidak merugikan pihak kreditor tertentu karena dalam kenyataannya sikap debitor kemungkinan tidak memberikan pertimbangan yang menyeluruh dan kemungkinan cenderung untuk mengutamakan kepentingan pihak kreditor tertentu.

Seorang hakim pengawas harus senantiasa jeli jangan sampai draft perdamaian yang akan disahkan nantinya mengandung unsur persekongkolan antara debitor dengan pihak kreditor tertentu. Jika hal sedemikian terjadi maka kemungkinan proses restrukturisasi dan *scheduling* utang tidak akan berjalan mulus ke depan walaupun undang 7 undang menentukan bahwasanya peranan hakim pengawas senantiasa tidaklah dapat mempengaruhi secara nyata atau memasukkan usulan-usulan yang sifatnya merupakan campur tangan peradilan terhadap kepentingan debitor dan kreditornya. Disamping itu peranan pengurus juga sangat menentukan didalam penyusun draft perdamaian tersebut. Karena bagaimanapun wewenang yang dimiliki pengurus sesuai dengan penetapan pengadilan adalah cukup kuat dan merupakan posisi yang penting didalam proses pelaksanaan perdamaian dalam PKPU ini.

Seorang pengurus tentunya tidak dapat bersikap berat sebelah. Seorang pengurus harus senantiasa berada di tengah-tengah kepentingan antara debitor dan kreditor-kreditornya. Disamping itu pengurus harus

senantiasa cakap untuk mengetahui secara detail keberadaan perusahaan sidebitor dan sedapat mungkin kalaupun pihak debitor bermaksud untuk menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengan asset-asset perusahaan dan keuangan perusahaan tersebut hal ini harus diantisipasi oleh pihak pengurus. Seorang pengurus tidak dapat lalai dan kedudukan serta kewenangan pengurus dijamin oleh undang-undang untuk dapat segera bertindak kalau perlu membatalkan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pihak debitor tanpa melalui persetujuan pihak pengurus.

Hal ini semata-mata dilakukan oleh pihak pengurus adalah untuk mengemban tanggungjawabnya agar pihak kreditor tidak sampai dirugikan karena undang-undang memberi sanksi bahwa jika pihak pengurus lalai melaksanakan tanggungjawabnya dan sampai menimbulkan kerugian baik terhadap harta debitor maupun kepentingan kreditor maka seorang pengurus dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi.

Berkaitan dengan putusan tanggal 9 September 2009 yang memberikan PKPU kepada debitor PT. Anugraha Tiara Sejahtera, selama 45 (empat puluh lima) hari adalah sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (4) UUK dan PKPU.

Berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU karena seluruh syarat telah dipenuhi dan terbukti. Alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU PT. PT. Anugraha Tiara Sejahtera. Adalah :

1. Daftar nama, alamat dan jumlah tagihan masing-masing kreditor;
2. Daftar tagihan-tagihan kepada pihak ketiga;
3. Rencana perdamaian;
4. Daftar aktiva tetap;

Syarat substansial yang harus dipenuhi oleh Pemohon PKPU, (sama halnya juga terhadap permohonan pailit) sebagaimana diatur dalam Pasal 225 UUK yaitu ;

1. Ada utang
2. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih
3. Ada dua atau lebih kreditor

Dalam pertimbangan hukumnya, permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah sebagai tanggapan atau tangkisan atau counter terhadap permohonan pailit, sehingga dengan mengajukan permohonan PKPU, maka Pemohon PKPU, PT. PT. Anugerah Tiara Sejahtera, telah mengakui segala sesuatu yang didalilkan oleh Pemohon Pailit, PT. Bank BUKOPIN Tbk. terutama tentang seluruh syarat substansial Pemohon PKPU.

Syarat substansial dalam mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 225 UUK dan PKPU, terlalu mudah atau ringan, bagi debitor yang beritikad baik, persyaratan tersebut mungkin sudah memadai, namun bagi debitor / perusahaan yang “nakal” yang berkeinginan mengulur-ulur waktu dengan mengajukan permohonan PKPU, persyaratan tersebut dimanfaatkan sebagai celah hukum.

Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya keinginan dari debitor “nakal” untuk mengulur-ulur waktu, padahal debitor/ perusahaan tersebut sudah tahu bahwa perusahaannya sudah tidak beroperasi lagi, maka perlu ditambahkan persyaratan lainnya yaitu harus ada hasil studi kelayakan yang menyimpulkan bahwa utang perusahaan layak untuk direstrukturisasi yang dibuat oleh satu tim independen yang terdiri dari konsultan hukum, akuntan publik, appraiser, dan konsultan manajemen keuangan dan bisnis.

Dengan adanya pendapat tim independen tersebut, maka perusahaan yang masih produktif, layak diberi hak untuk hidup oleh Pengadilan Niaga, sehingga kepentingan *Stake Holder* (buruh, majikan, retailer, pemegang saham, pajak negara) tidak dirugikan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

Putusan tentang pengesahan sudah sesuai dengan Pasal 222, 225, 227 dan 229 UUK dan PKPU, dimana PKPU yang diberikan oleh Pengadilan Niaga kepada PT. PT. Anugerah Tiara Sejahtera selama 45 (empat puluh lima) hari adalah suatu tenggang waktu untuk bernegosiasi antara debitor dan kreditor. Dalam bernegosiasi tersebut, debitor harus berperan aktif agar seluruh kreditor dapat menerima Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitor sehingga terjadi win-win solution. Masa PKPU adalah masa bernegosiasi, bukan masa pembayaran utang, tapi merestrukturisasi utang.

Inilah keterkaitan-keterkaitan berbagai pihak dalam proses pelaksanaan PKPU dan juga dalam restrukturisasi perusahaan kedepan dan para pihak ini

tentunya akan senantiasa mempertahankan kedudukan masing-masing dan ini juga merupakan salah satu kebaikan yang positif bahwa proses PKPU ini senantiasa mendapat perlindungan dan pengawasan yang ketat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditornya, putusan Pengadilan Niaga terhadap PT. ATS telah sejalan dan sesuai dengan UUK dan PKPU No. 37 Tahun 2004.

C. Perlindungan Kepentingan Para Pihak (Kreditor dan Debitor) Dalam PKPU

Dalam Undang-Undang yang baru, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah dimungkinkannya pihak kreditor untuk mengajukan PKPU bagi debitor yang mengalami kesulitan pembayaran utangnya, tentunya merupakan wahana baru karena dalam ketentuan undang-undang yang lama baik semasa diterapkannya ketentuan *Faillissement Verordening* Stb. 1905 Nomor 217 juncto Stb. 1906 Nomor 348, maupun semasa diterapkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, hal ini tidak dapat dilakukan oleh sikreditor, sehingga jalan yang ditempuh oleh sikreditor untuk melindungi piutangnya yaitu hanyalah mengajukan pailitnya sidebitor tersebut.

Dalam prakteknya, memang ada para pihak yang setelah mengajukan permohonan PKPU ini, kemudian mencabut kembali permohonannya dan persoalannya diselesaikan diluar pengadilan antara sikreditor dan sidebitor

yang memiliki utang. Kemungkinan hal ini ditempuh oleh para pihak demi kemudahan prosedur penyelesaian utang piutangnya tanpa melibatkan pihak pengadilan.

Hal semacam ini bisa saja terjadi sebab masalah utang piutang ini hanyalah kasus perdata. Sehingga kemauan para pihak tentunya tidak dapat dipersoalkan, namun langkah perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tentunya tidaklah sekuat jika keputusan perdamaian para pihak mendapat homologasi dari pihak pengadilan, sebagaimana halnya tujuan PKPU itu yang diatur dalam Undang-Undang.

Perjanjian perdamaian yang diputus oleh pengadilan dalam permohonan PKPU terdahulu, ternyata mengalami hambatan, sehingga belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan kreditor pemegang hak tanggungan belum menyatakan persetujuannya terhadap perjanjian perdamaian tersebut.

Pengajuan PKPU secara berulang karena tidak tercapainya kesepakatan atau mendapat hambatan didalam pelaksanaannya memang tidak ada larangan undang-undang, namun disatu sisi hal ini merupakan satu kelemahan dalam penyusunan draft perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak. Proses seperti ini tentunya sangat menghambat jalannya restrukturisasi perusahaan kedepan. Oleh karenanya disarankan bahwa dalam penyusunan draft perdamaian yang nantinya menjadi acuan para pihak didalam proses restrukturisasi dan *scheduling* utang draft perdamaian tersebut

hendaknya benar-benar telah bulat dan kokoh dan sedapat mungkin mempertimbangkan juga faktor-faktor eksternal yang kemungkinan dapat menghambat proses restrukturisasi ini ditengah jalan.

Para kreditor yang memiliki hak-hak jaminan kebendaan, maupun hak-hak yang oleh undang-undang diberikan untuk didahulukan seperti para pemegang hak gadai, hipotik (pada saat ini hanya diberlakukan terhadap hipotik pesawat terbang dan kapal laut sementara untuk jaminan barang tidak bergerak yang berupa tanah telah beralih kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), jaminan untuk barang-barang bergerak (fidusia), dan hak tanggungan.

Para pemegang hak jaminan seperti tersebut diatas kemungkinan bisa bersikap mengabaikan perihal langkah-langkah perdamaian yang dibuat oleh sidebitor kepada para sikreditor konkuren. Karena kekuatan hak jaminan tersebut yang memang sudah memberikan perlindungan yang cukup kepada para kreditor pemegang hak jaminan tersebut terhadap dipertimbangkan bahwa sesuai ketentuan, yang mengatur perihal PKPU ini, bentuk-bentuk kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yaitu sidebitor dengan para kreditor konkuren juga harus mendapat persetujuan para kreditor lain yang memiliki hak-hak jaminan tersebut di atas.

Kontrak-kontrak yang dibuat sebelumnya oleh para pihak antara sidebitor dengan para kreditor pemiiik hak-hak jaminan tersebut sudah cukup mengikat, apalagi dalam suatu bentuk perjanjian pemberian kredit sehingga

saran penulis para pemilik hak jaminan kebendaan tersebut pembayaran piutang-piutangnya oleh debitor. Namun harus senantiasa harus cukup diwaspadai jangan sampai menyulitkan dalam proses pengambilan kata sepakat dalam perdamaian yang ditawarkan, karena sekali para kreditor pemegang hak-hak jaminan tersebut ikut menandatangani persetujuannya pada draft perdamaian yang diajukan dan telah mendapat pengesahan pihak pengadilan maka sebagai konsekuensinya draft perdamaian tersebut akan mengikat keseluruhan perdamaian apakah dia para kreditor konkuren ataupun para kreditor lainnya, tanpa terkecuali termasuk yang memiliki hak-hak jaminan kebendaan sekalipun.

Menurut kajian analisis penulis terhadap kasus ini, dimana dikarenakan rencana perdamaian atau *composition plan* yang telah ditawarkan oleh para debitor dan ternyata mendapat dukungan dari para pihak kreditor maka rencana kearah restrukturisasi utang dengan baik dan murah. Dalam beberapa hal uraian terdahulu penulis telah menjelaskan perihal pentingnya para kreditor untuk memahami kondisi perusahaan debitor yang sedang bermasalah dimana para kreditor diharapkan dalam pelaksanaan restrukturisasi utang yang diajukan oleh debitornya tidak lagi semata-mata dari profit bisnis karena kondisi perusahaan sidebitor sedang berada dalam keadaan *stagnant* dan lemah. Masalah kepailitan tidak semata-mata tergantung kepada kebangkrutan yang mulai terjadi pada perusahaan sidebitor yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Anjloknya nilai saham perusahaan.
2. Menurunnya produktivitas dan *cash flow* perusahaan.
3. Kondisi perusahaan yang sudah *stagnant*.
4. Perubahan nilai kurs yang tajam.
5. Utang perusahaan yang sudah jatuh tempo.

Di sisi lain hal yang mempercepat proses terjadinya kepailitan juga adalah sikap para kreditor akibat karena tidak memperoleh informasi secara transparan tentang kondisi keuangan debitornya lebih memilih dengan cara mempailitkan perusahaan tersebut yang pada akhirnya juga sangat merugikan banyak pihak. Jika melihat pada fakta-fakta suatu krisis ekonomi yang begitu berat melanda perekonomian Indonesia dalam era krisis 1998 sampai dengan 2003 mungkin akan lebih banyak lagi yang paint jika pemerintah waktu itu tidak mengambil kebijaksanaan dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pada prinsipnya juga melakukan langkah-langkah restrukturisasi dan reorganisasi khususnya terhadap dunia perbankan kita.

Menurut Kartini Mulyadi langkah-langkah yang diambil oleh BPPN waktu itu dikarenakan lembaga tersebut memiliki kewenangan publik dengan didukung oleh 3 (tiga) peraturan pokok :⁵⁰

1. Pasal 37 A ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵⁰ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Op. Cit.*, hal.235,

2. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 tentang Penyehatan. Perbankan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
3. Pasal 2 ayat (1) keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 170/KMK.017/1999 dengan Gubernur Bank Indonesia No. 31/15/KEP/BI tanggal 26 Maret 1999.

Penulis ingin menambahkan lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP No.27 Tahun 1998) tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dengan ketentuan tersebut, maka sebenarnya BPPN dapat mengajukan permohonan kepailitan atas debitor yang telah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank-bank dalam penyehatan, yang diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN termasuk Bank *take over*, secara langsung untuk dan atas nama masing-masing bank dalam penyehatan tersebut. Semua ini merupakan langkah kewenangan publik yang diberikan undang-undang perbankan yang tidak dapat disangkal dan dibentah, dengan demikian disamping mengajukan diri untuk dan atas nama masing-masing bank dalam penyehatan, BPPN juga dapat menunjukkan diri untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai pemilik dari piutang yang telah dialihkan dan diserahkan kepadanya.⁵¹

⁵¹ Kartini Mulyadi, *Op. Cit.*, hal.236.

Dalam kajian analisis kasus yang penulis teliti ternyata BPPN memang tidak otomatis mempailitkan para debitor yang tidak lagi dapat memenuhi utangnya yang telah jatuh tempo kepada bank-bank dalam penyehatan, namun juga menerima permohonan PKPU debitor disamping melakukan bentuk-bentuk penyehatan, yang telah merupakan langkah-langkah reorganisasi bagi bank selaku kreditor yang juga bermasalah secara internal. Namun BPPN dalam melaksanakan misinya tersebut juga banyak melakukan kelemahan-kelemahan sehingga meninggalkan banyak permasalahan termasuk sampai pada saat berakhirnya/penutupan lembaga tersebut. sebenarnya peranan / kemauan para pihak untuk menghindarkan proses likuidasi pengalihan piutang ataupun dengan kepailitan perusahaan tersebut sangat menentukan.

Pentingnya mewujudkan/menyepakati suatu perjanjian perdamaian yang merupakan inti dari terlaksananya PKPU ini, sebab bagaimanapun kondisi perusahaan debitor sudah berada pada posisi yang lemah, sehingga sebagian utang-utang perusahaan mungkin sudah jatuh tempo dan belum dapat dibayar.

Sidebitor berusaha untuk tidak pailit sebab melihat prospek dan peluang usaha untuk bangkit masih ada, mungkin pertimbangan itu berdasarkan pada evaluasi produksi asset perusahaan dan utang piutangnya yang sedang berjalan. Namun bagaimanapun masih kondusifnya perusahaan tersebut, utang tetap utang yang telah jatuh tempo tetap dapat ditagih oleh pihak

kreditor bahkan mungkin perusahaan tersebut dimohonkan pailit dengan adanya utang kepada lebih dari satu orang kreditor yang telah ada yang sudah jatuh tempo. Oleh karenanya dalam setiap pengajuan PKPU ini, masalah rencana perdamaian ini merupakan kunci pokok bagaimana sidebitor dapat membuat/mengusulkan suatu rencana perdamaian (*composition plan*) yang menarik pihak kreditor untuk bersama-sama berunding dan memutuskan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Berikut dari hasil penelitian penulis langkah-langkah perdamaian yang ditempuh dalam rangka menyusun suatu *rescheduling* utang dan usaha merestrukturisasi dan reorganisasi perusahaan sidebitor. PKPU dilaksanakan yaitu dengan melakukan reorganisasi dan penjadwalan utang. Dari tinjauan terhadap kasus proses pengembalian utang dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

1. Jumlah utang yang telah disepakati ditukar menjadi bentuk saham di perusahaan ini (konversi) dan sekaligus melibatkan kreditor dalam sistem manajemen, cara ini memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut :
 - a) Melibatkan kreditor atau mitra usaha dalam manajemen perusahaan, keterlibatan mitra kerja seperti ini mengakibatkan terjadi perubahan manajemen dalam skop perjanjian perdamaian.
 - b) Keterlibatan kreditor mungkin membuat kedudukan perusahaan lebih kuat, terutama perusahaan yang belum *go public*.
 - c) Mungkin bisa diharapkan terjadi penyuntikan dana segar (rekapitalisasi)

hal ini sangat menentukan sekali untuk dapat bangkitnya perusahaan tersebut.

- d) Kreditor dapat terlibat lebih jauh dalam bidang pemasaran khususnya bagi mitra usaha vertikal. atau kemudian menjadi semacam bapak angkat.
- 2. Penjadwalan utang yang tidak terikat dengan batas waktu misalnya dengan menyerahkan sebagian asset perusahaan kepada pihak kreditor dalam bentuk perjanjian pengikatan jual beli terhadap asset-asset property perumahan real estate, apartemen dan penyewaan gedung-gedung perkantoran.
- 3. Penjadwalan utang dalam tempo yang cukup lama misal sampai dengan 10 tahun.

Dalam menyusun suatu rencana perdamaian menurut penulis yang penting adalah :

- 1. Pertimbangan terhadap feasibilitas usaha, tinjauan terhadap prospek kedepan masih ada atau tidak.
- 2. Dukungan dari asset perusahaan yang ada termasuk saham-saham yang masih bisa diperjual belikan.
- 3. Dukungan SDM yang masih memadai.
- 4. Adanya kesediaan kreditor memberikan bantuan dana segar.
- 5. Kondisi real ekonomi termasuk kebijaksanaan fiskal dan moneter oleh pemerintah.

6. Itikad baik debitor dan dukungan kerjasama para pihak.

Jika keenam faktor tersebut masih ada, perusahaan tersebut layak dan patut didukung dalam membuat rencana perdamaian *composition plan* tersebut.

Dari hasil-hasil penelitian, masih terlihat beberapa hal yang menurut penulis kurang dipahami konsep reorganisasi dan restrukturisasi secara lebih luas dan semata-mata terfokus pada jadwal pengembalian utang terhadap kreditor saja. Sebenarnya kreditor punya andil dalam mengangkat perusahaan tersebut dalam anti restrukturisasi dan reorganisasi yang nantinya dapat melangsungkan hubungan bisnis para pihak, tidak hanya terbatas pada pengembalian utang saja.

Apalagi cara penjadwalan utang dan pengembaliannya sebagaimana telah penulis uraikan di atas sebagian dilakukan dengan mengikut sertakan piutang dari kreditor tersebut dikonversi menjadi pemilikan saham didalam perusahaan tersebut, berarti para kreditor yang selaku demikian telah berubah fungsi dan kedudukannya menjadi orang dalam (*insider group*) atau turun andil dalam sukses atau bangkitnya perusahaan ke depan apalagi jika si kreditor akhirnya menjadi pemegang saham mayoritas didalam perusahaan yang melakukan PKPU tersebut. Berikut tujuan restrukturisasi dalam arti lebih luas.

Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Banyak perusahaan melakukan pembenahan supaya segera lepas dari krisis melalui berbagai aspek secara klasik, manajemen, dan penasehat perusahaan sering melakukannya dalam tahap-tahap : perbaikan *cash flow*, peningkatan efisiensi, peningkatan produktifitas, peningkatan profitabilitas dan diakhiri dengan peningkatan nilai perusahaan.⁵²

⁵² Bramantyo Djohanputro, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai*, Penerbit PPM, Jakarta,

Perbaikan-perbaikan tersebut menyangkut berbagai aspek, bahkan seluruh aspek perusahaan, mulai dari perbaikan porto folio⁵³ perusahaan, perbaikan permodalan, perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan, sampai perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian masalah restrukturisasi perusahaan merupakan kepentingan semua pihak bukan saja direktur utama, tetapi seluruh anggota direksi mulai dari direktur pemasaran, operasi, keuangan, maupun SDM.

Restrukturisasi perusahaan juga merupakan kepentingan komisaris, yang mewakili kepentingan pemegang saham, mau tidak mau tujuan utama restrukturisasi adalah untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yaitu maksimalisasi kekayaan atau nilai mereka, restrukturisasi juga merupakan kepentingan karyawan keseluruhan, karena tindakan restrukturisasi akan berdampak pada semua karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk restrukturisasi yang paling sering dilakukan :⁵⁴

| Jangka Pendek | Jangka Panjang |
|---------------|----------------|
|---------------|----------------|

2004, hal.2.

⁵³ Restrukturisasi porto folio adalah kegiatan ataupun upaya berkaitan dengan penyusunan kembali seluruh asset perusahaan untuk meningkatkan kinerja asset tersebut lebih berdaya guna dimasa depan, bentuk perbaikan porto folio dimaksud dilakukan bisa dengan menjual asset, menjual anak perusahaan atau sebaliknya mengefisiensikan asset atau mengefisiensikan anak perusahaan atau pada lini bisnis termasuk pemanfaatan tenaga kerja, juga pada mitra kerja atau meningkatkan kinerja divisi menjadi semacam *investment centre* yang ada, sehingga korporat/perusahaan lebih berfungsi, lebih memiliki energi baru.

⁵⁴ Bramantyo Djohanputro, *Op.Cit*, hal. 36

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemangsaan | <ul style="list-style-type: none"> • Divestasi • Penghapusan • <i>Stock buy back</i> • Penetapan harga • Efsiensi • Pengurangan staf | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Harvesting</i> • Segmentasi pasar • Pemokusan pada R & D (Penelitian dan pengembangan). • Perubahan struktur • <i>Business process Reengineer</i> |
| Pengembangan | <ul style="list-style-type: none"> • Akusisi khusus • Pengembangan produk • Pengembangan staf • Manajemen kinerja | <ul style="list-style-type: none"> • Akusisi/merger/konsolidasi. • Aliansi strategic • <i>Private placement</i> • Penawaran umum • Penyempurnaan visilmisi • Perbaikan sistem SDM |

Lebih jauh lagi perihal restrukturisasi perusahaan ini, penulis mengutip paparan Bramantyo Djohanputro dalam bukunya tersebut (Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai) meliputi 10 langkah :

1. Membangun sendiri strategis bisnis unit (SBU). Di sini diperlukan 2 studi kelayakan :
 - a) Kelayakan dari segi keuangan (aspek-aspek keuangan perusahaan).
 - b) Kelayakan ekonomi (karena pengaruh faktor-faktor eksternal perusahaan akhir-akhir ini semakin besar).

Studi kelayakan keuangan adalah upaya untuk mengumpulkan data, menganalisis, membuat prediksi atau skenario dan membuat kesimpulan mengenai apakah sebaiknya perusahaan melakukan investasi pada suatu proyek atau SBU. Data analisis skenario dan kesimpulan yang dibuat menyangkut semua aspek berkaitan dengan investasi. Ujung dari proses ini adalah perhitungan keuangan, berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk investasi dan berapa uang yang bisa diharapkan diterima investasi tersebut. Investasi yang layak adalah bila jumlah uang yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan

jumlah uang yang diharapkan akan diterima.⁵⁵

2. Evaluasi dan strategi dan kebijakan.

Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan informasi serta strategi kebijakan perusahaan kearah mana pengembangan perusahaan, langkah apa yang diperbaiki serta evaluasi terhadap dokumen rencana strategi perusahaan.

Dan kelompok ini perlu secara internal melakukan *focus group discussion*.

3. Evaluasi port folio bisnis.

Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap divisi atau SBU, sehingga mengetahui berapa ukuran SBU yang akan dikembangkan berdasarkan berbagai batasan (*constraints*) perusahaan. Pembentukan SBU hendaknya disesuaikan dengan kemampuan induk perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan SBU tergantung seberapa jauh penerimaan pasar terhadap produk SBU.

4. Evaluasi pasar dan pemasaran.

Tujuannya seberapa jauh kemampuan pasar dan jangkauan SBU yang baru dan bagaimana prediksi pemasaran mengukur dan trend permintaan pasar atas produk SBU, perlu diperhatikan apakah di pasar terjadi monopoli.

5. Evaluasi undang-undang dan peraturan.

Kajian ini untuk menyesuaikan ruang gerak SBU yang baru, hindari akusisi

⁵⁵ Devisi atau Strategi Bisnis Unit (SBU), dalam korporat yang merupakan satu kesatuan usaha dan manajemen divisi atau SBU tersebut memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam menjalankan divisi atau SBU tersebut atau dengan kata lain sebuah SBU merupakan sebuah *investment centre* (Bramantyo Djohanputro, *Op.Cit.*, hal. 48).

yang mengarah kepada monopoli. Evaluasi undang-undang ini mengandung 3 komponen :

- a) Evaluasi historis mengenai undang-undang.
- b) Proyeksi dan penetapan skenario, kondisi perundang-undangan dan peraturan kedepan.
- c) Dampak bila proyeksi dan skenario perundang-undangan dan peraturan tersebut terjadi pada perusahaan.

6. Evaluasi teknis dan operasi.

Pengembangan sebuah SBU memerlukan dukungan teknis peralatan operasional yang harus disediakan oleh perusahaan, untuk mendukung SBU harus diperhatikan seberapa jauh dukungan dari fasilitas tersebut terhadap kelangsungan operasi.

7. Evaluasi keuangan pada proyeksi penjualan.

Berapa unit dan rupiah yang dihasilkan melalui penjualan produk. Apakah penjualan dilakukan secara tunai atau kredit.

8. *Payback period.*

Di sini perlu tolak ukur berapa lama uang yang akan dikeluarkan untuk investasi akan kembali. Semakin cepat uang kembali berarti investasi tersebut semakin baik, jika tidak menguntungkan agar SBU dihentikan.

9. *Net Present Values.*

Dengan melakukan perhitungan Batas standar artinya SBU baru dijalankan

jika NPP sebesar nol atau lebih.

10. *Internal Rate of Return (IRR)*.

Dengan metode ini Perusahaan induk dapat menilai SBU baru mana yang perlu mendapat prioritas dan mana yang harus ditunda.

Penulis beranggapan karena banyaknya perusahaan yang bersifat *holding company* maupun pada perusahaan yang bersifat vertikal (sejenis) yang mempunyai banyak anak perusahaan, maka langkah-langkah penggunaan metode *strategic business unit* ini sangat perlu dalam upaya merestrukturisasi agar perusahaan yang sedang menjalankan PKPU dalam upaya restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan dapat terhindar dari kepailitan apalagi jika mencanangkan suatu langkah restrukturisasi, reorganisasi sampai 10 tahun kedepan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui mengenai penyelesaian utang piutang suatu perusahaan melalui terhadap kreditor maupun debitor di Pengadilan Niaga yaitu :

1. Pengajuan permohonan PKPU cukup ditandatangani oleh debitur dan kuasa hukumnya dimana permohonan PKPU disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor data dapat dilampiri dengan rencana perdamaian yang berisi tentang restrukturisasi utang
2. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu.

3. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu 20 (dua puluh hari) sejak tanggal didaftarnya surat permohonan harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UU Kepailitan diberikan waktu jangka waktu maksimum 45 hari, dan menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat seorang atau lebih Pengurus untuk mengurus harta kekayaan debitor untuk dihitung sejak tanggal dimulainya penundaan sementara kewajiban pembayaran utang tidak berwenang melakukan tindakan kepengurusan dan pengalihan berkenaan dengan kekayaannya.
4. Selama berlangsungnya PKPU debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan
5. Rencana perdamaian yang diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU sementara sangat membantu untuk mempercepat dalam menyelesaikan utang piutang perusahaan yang isi pokoknya adalah tentang alternatif restrukturisasi utang
6. Apabila Pengadilan Niaga telah memberikan PKPU Tetap yang Jangka waktu maksimum 270 hari, dimana rencana perdamaian diterima oleh suara terbanyak berdasarkan hasil voting, maka rencana perdamaian menjadi perjanjian perdamaian kemudian disahkan oleh Pengadilan, perdamaian menjadi mengikat bagi debitor dan seluruh kreditor, oleh karena itu debitor

terhindar dari pailit.

7. Selain itu Kreditor juga terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga, dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit (lihat Ps. 160, 161, jo 276 UUK)
8. Apabila rencana perdamaian tersebut ditolak, maka pengadilan juga menyatakan debitur pailit (217 ayat 3)
9. Tidak ada lagi upaya kasasi bagi debitur bila permohonan PKPU secara tetap ditolak oleh kreditor konkuren, sebaliknya, bila permohonan debitur disetujui oleh kreditor konkuren, maka kreditor konkuren yang tidak setuju juga tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi maupun upaya peninjauan kembali

Perlindungan kepentingan para pihak (kreditor dan debitur) dalam penyelesaian utang piutang suatu perusahaan melalui proses PKPU terhadap kreditor maupun debitur di Pengadilan Niaga, mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dan konsekuensi merugikan yaitu :

1. Keuntungan penyelesaian proses penyelesaian utang piutang melalui proses PKPU antara kreditor dan debitur didasarkan pada suara terbanyak yaitu hasil voting, prosesnya lebih cepat jika dibandingkan dengan proses penyelesaian melalui gugatan perdata biasa, melalui kepasitan, maupun melalui lembaga gijzeling, yang banyak menghabiskan waktu, dan prosedur

yang panjang, tenggang waktu proses PKPU sangat cepat dan jelas yaitu 270 hari, sehingga akan lebih menjamin kepastian waktu penyelesaian utang piutang, prosesnya didahulukan penyelesaiannya dibandingkan dengan upaya-upaya hukum yang lainnya, seperti proses penyelesaian melalui gugatan perdata biasa maupun kepailitan dan lembaga gijzeling, dapat mengganggu pelaksanaan eksekusi, selama berlangsungnya proses PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang utangnya kepada kreditor, selalu ada kontrol hakim pengawas dan pengurus terhadap tindakan debitur, sehingga dapat mengurangi kerugian – kerugian yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan debitur -debitur nakal, menjamin adanya transparansi terhadap seluruh kreditor, karena proses PKPU ini harus diumumkan kepada seluruh kreditor yang merasa dirugikan oleh debitur, adanya suatu harapan atau keinginan dari debitur, bahwa terhadap asset-asset dan kekayaannya akan tetap dapat dipertahankan oleh debitur, sehingga dapat memberikan suatu jaminan bagi pelunasan utangutangnya kepada seluruh kreditor, sebagai suatu upaya hukum dari debitur untuk menghindari proses pailit, sehingga debitur masih dapat menjalankan usahanya, adanya harapan kreditor bahwa piutang-piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitur, sebagai suatu upaya hukum untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang utangnya kepada kreditor dan kreditor tidak akan sewenang-wenang mengambil bagian harta yang dinyatakan pailit.

2. Kerugian penyelesaian utang-piutang lalui PKPU terhadap kreditor maupun debitor, yaitu terhadap perbedaan peraturan procedural, sehingga hak dan kewenangan dalam PKPU menjadi berlainan dengan hak dan kewenangan dalam kepailitan, dalam kepailitan hak dan kewenangan debitor yang berkaitan dengan harta pailit diambil alih oleh kurator sedangkan dalam PKPU debitor masih mempunyai hak dan kewenangan, PKPU tidak dapat ditujukan kepada eksekusi barang-barang debitor dan pembagian hasil kepada para kreditor, PKPU tersebut berakibat debitor untuk selama jangka waktu tertentu tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya, jadi kewajiban untuk membayar utangnya ditangguhkan Selama ada PKPU

Secara umum hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian atas utang piutang suatu perusahaan melalui proses PKPU di Pengadilan yaitu:

1. Masalah itikad baik pemohon PKPU yang menyalahgunakan kesempatan pengajuan PKPU baik setelah mendapatkan PKPU sementara maupun asset -asset perusahaan. Oleh sebab itu setelah diputuskannya PKPU sementara maka Pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas dan pengurus yang bersama-sama dengan debitor mengurus harta debitor.
2. Melakukan usulan rencana perdamaian yang tidak proporsional dan bersikap menguntungkan atau mengutamakan kepentingan sepihak, sehingga sulit dicapai kesepakatan, oleh karena itu dalam hal pembuatan rencana perdamaian tersebut seharusnya melibatkan pare ahli seperti appraiser, auditor, konsultan hukum, management keuangan dan bisnis dan pakar

mengenai industri yang bersangkutan

3. Isi pokok dari rencana perdamaian adalah restrukturisasi utang sedangkan dalam undang-undang Kepailitan juga tidak mengatur secara rinci mengenai restrukturisasi utang hanya mengandalkan pendapat para ahli hukum, keuangan dan bisnis, penilai sehingga para kreditor tidak mengetahui secara pasti keadaan debitor perusahaan yang menawarkan restrukturisasi utangnya dalam rencana perdamaian, sehingga akibatnya debitor perusahaan yang beritikad tidak baik, bisa saja rencana perdamaian tersebut karena ketidaktahuan dari kreditor mengenai kondisi debitor perusahaan diterima oleh kreditor atau sebaliknya debitor dalam PKPU tetap mencoba merugikan para kreditornya dengan perusahaan yang beritikad baik dan perusahaannya masih berjalan dan mempunyai prospek, rencana perdamaian yang diajukannya ditolak oleh kreditor, sehingga pailit lalu perusahaannya dilikuidasi. Apabila keadaan demikian yang terjadi, maka pemulihan ekoomi Indonesia yang disebabkan oleh krisis moneter, akan mengalami hambatan, sebab kaedah hukum yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan yang antara lain dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi ternyata tidak banyak dapat diharapkan.
4. Debitor dan Pengurus lalai dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah diputus bersama dalam rencana perdamaian, seperti debitor melakukan wanprestasi melanggar semua isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama oleh karena debitor wanprestasi dalam

melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut Maka kreditor dapat memintakan pembatalan Perjanjian Perdamaian tersebut kepada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga menetapkan Debitor dinyatakan pailit dan bagi pengurus yang lalai dapat dimintakan ganti rugi kepadanya atas kelalaian yang dibuat oleh pengurus tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan kepentingan para pihak (kreditor dan debitor) dalam PKPU, maka menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menghindarkan suatu perusahaan terbebas dan kepaititan, khususnya pada Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 dimana pihak kreditor juga telah dapat mengajukan PKPU bagi debitornya, yang selama ini tidak dimungkinkan oleh Undang-undang No.4 Tahun 1998 sehingga bagi kreditor yang mengalami permasalahan dengan utang-utang debitor yang telah jatuh tempo demi keamanannya, hanya mempunyai jalan mempailitkan debitor, jika cara-cara yang bersifat musyawarah tidak bermanfaat. Namun dengan terbukanya kesempatan bagi kreditor mengajukan PKPU bagi debitornya sudah merupakan cara untuk memungkinkan tidak mempailitkan debitor, karena harus diakui pihak kreditor juga mempunyai kepentingan lain kepada debitornya sebagai mitra bisnis. Pada kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera, kepentingan para pihak telah mendapatkan perlindungan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditornya adalah sebagai tanggapan atau tangkisan atau counter terhadap permohonan pailit, sehingga dengan mengajukan permohonan PKPU, maka Pemohon PKPU, PT. PT. Anugrerah Tiara Sejahtera, telah mengakui segala sesuatu yang didalilkan oleh Pemohon Pailit, PT. Bank BUKOPIN Tbk. terutama tentang seluruh syarat substansial Pemohon PKPU.
2. Perlindungan kepentingan para pihak (kreditor dan debitor) dalam PKPU merupakan salah satu cara untuk menghindarkan suatu perusahaan terbebas dan kepaititan, khususnya pada Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 dimana pihak kreditor juga telah dapat mengajukan PKPU bagi debitornya, yang selama ini tidak dimungkinkan oleh Undang-undang No.4 Tahun 1998 sehingga bagi kreditor yang mengalami permasalahan dengan utang-utang debitor yang telah jatuh tempo demi keamanannya, hanya mempunyai jalan mempailitkan debitor, jika cara-cara yang bersifat musyawarah tidak bermanfaat. ¹⁰³ ¹⁰³ dengan terbukanya kesempatan

bagi kreditor mengajukan PKPU bagi debitornya sudah merupakan cara untuk memungkinkan tidak mempailitkan debitor, karena harus diakui pihak kreditor juga mempunyai kepentingan lain kepada debitornya sebagai mitra bisnis. Pada kasus PT. Anugerah Tiara Sejahtera, kepentingan para pihak telah mendapatkan perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 masih harus diuji keberadaannya setelah kekurangan-kekurangan Undang-undang No.4 Tahun 1998 diperbaiki/ disempurnakan dan ditambah pengalaman-pengalaman dalam kasus-kasus kepailitan dan PKPU yang terjadi selama ini, hendaknya nanti dapat lebih baik dalam, penerapannya ditinjau dari makna tujuan kepailitan dan PKPU itu diberikan. Untuk itu kemungkinan diperlukan studi banding dengan hukum kepailitan yang diterapkan di negara lain yang menjalankan aturan-aturan mengenai kepailitan (*Bankruptcy*) ini dengan baik.
2. Bagi pihak penegak hukum dan praktisi hukum, penerapan undang-undang kepailitan dan PKPU ini secara baik, mendukung hidupnya hukum bisnis di Indonesia dan akan mengundang Investor masuk dan tentu saja akan memperbaiki iklim dan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih lesu dan *stagnant* sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Aria Suyudi, Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004).
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bismar Nasution dan Sunarmi, *Diktat Hukum Kepailitan*, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana USU, Medan, 2003
- Bramantyo Djohanputro, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai*, Penerbit PPM, Jakarta, 2004
- Chatamarrasjid ais, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil), Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- David G. Epstein, Steve H. Nickles dan James J. White, *Bankruptcy* (ST. Paul. Mine : West Publishing Co, 1993,
- Fred B.G.Tumbuan, 2000, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran PKPU*, Alumni, Bandung,
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
- Hans Kalsen, 1973 *Teori Hukum Murni*, terjemahan Drs Somardi, Rindi Press, Jakarta.
- I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Kasaint Blanco, 2002),
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993),
- Jono, 2009, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Bandung.

Kartini Muljadi (2005), "*Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*", Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta (selanjutnya disebut sebagai Kartini Muljadi 2),

Kartini Muliadi, Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja (Jakarta : Grafindo Persada, 2003),

Lontoh dkk, 2001. *Penyelesaian Utang Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

M. Hadi Subhan, 2001. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Man S. Sastrawidjaya, 2006 *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Almuni Bandung.

Mark S, Scarbery, Kenneth N. Klee, Grant W. Newton dan Steve H. Nickles, *Busines Reorganization In Bankrupcy*, (St. Paul Minnesota : West Publishing Co, 1996,

Munir Fuady.1999. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1992, Kamus Hukum, PT. Padnya Paramita, Jakarta

S. Mantayborbir, Iman Jauhari, Agus Hari Widodo, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, (Medan : Pustaka Bangsa, 2002),

Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, 1982 *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, (Bandung : Alumni, 1999),

-----, *Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

-----, 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1998 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta

-----, dan Sri Mamuji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Usulan Penelitian dan Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

2. Makalah dan/atau Artikel

Jurnal Manajemen, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Bahan Kuliah Management; 2009, Google

Sutan Remy Syahdeini, Antisipasi Dunia Usaha Atas Pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Ekonomi Nasional, Makalah pada Forum Informasi & Dialog Hukum Bisnis di Gedung AEKI tanggal 30 September 1998 hal 12-13 seperti dikutip oleh Chatamarrajid.

Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehaiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000)

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

